Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) dari Jakarta ke Sepaku, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur bukan lagi sekedar wacana, akan tetapi telah diumumkan secara resmi oleh Presiden Jokowi pada tanggal 26 Agustus 2019. Ditegaskan bahwa pemindahan IKN akan dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.

Maka perlu membuat kajian yang muaranya tidak hanya penting bagi pihak pemerintah selaku penyelenggara negara, akan tetapi penting dan berguna juga untuk masyarakat luas (khususnya masyarakat lokal/adat). Kajian akademik dari berbagai disiplin ilmu guna meminimalisir dampak buruk dari berbagai aspek, yaitu secara sosial/kemasyarakatan/kemanusiaan, budaya/adat/tradisi atau aspek lokal-kultur, politik, keterkaitan antara tatanan hukum nasional dan hukum adat, kesehatan, aspek lingkungan atau kelestarian alam/hutan, pendidikan, perekonomian masyarakat lokal, karakter dan kepribadian anak-anak, dan lain sebagainya.

Mulawarman University Press

Membaca Ibu Kota Negara secara Multidisiplin | Dr. Rosmini, M.H., dkk.

Editor:
Dr. Rosmini, M.H.
Dr. Muhammad Arifin, M.Hum.
Dr. Yayuk Anggraini, M.Si.

Membaca Ibu Kota Negara

Secara Multidisiplin

Mulawarman University Press

Membaca Ibu Kota Negara
secara Multidisiplin

UU No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta
Fungsi dan sifat hak cipta Pasal 4
Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Pembatasan Pelindungan Pasal 26
Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

i. Penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
ii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
iii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman sebagai bahan ajar; dan
iv. Penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Membaca Ibu Kota Negara

secara Multidisiplin

Editor:
Rosmini
Muhammad Arifin
Yayuk Anggraini

Penerbit
Mulawarman University PRESS

MEMBACA IBU KOTA NEGARA
secara Multidisiplin

Penanggung Jawab:
Anton Rahmadi, Ph.D

Pengarah:
Uni W. Sagena, Ph.D

Editor:
Rosmini
Muhammad Arifin
Yayuk Anggraini

Desain Cover:
Tim MUPress

Tata Letak:
Yayuk Anggraini

Sumber gambar :
Abdul Jalil (Liputan 6)

Ukuran:
143 hal, Uk: 15.5 x 23 cm

ISBN: 978-623-5262-35-2
© 2022. Mulawarman University Press
Cetakan Pertama: November 2022

Hak Cipta 2022, Pada Penulis
Isi diluar tanggung jawab percetakan
Copyright © 2022 by Mulawarman University Press
All Right Reserved

Hak cipta dilindungi undang-undang Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit

PENERBIT MULAWARMAN UNIVERSITY PRESS
IKAPI: 004/Anggota Luar Biasa/KTI/2017; APPTI: 004.042.1.04.2018
Alamat: Gedung LP2M Universitas Mulawarman Jalan Kerayan, Kampus Gunung Kelua – Samarinda, 75123, Telp/Faks: (0541) 747432

Official Web: https://www.mup.unmul.ac.id Marketing Web: https://unmulpress.com

E-mail: mup@unmul.ac.id

Membaca Ibu Kota Negara

secara Multidisiplin

Penulis:
Andi Wahyu Irawan
Ali Suhardiman, Ariyanto & Yohanes Budi Sulistioadi
Rahmat Bakhtiar & Krispinus Duma
Suria Darma
Rendy Wirawan
Danial & Isradi Zainal
Paulus Matius
Asril Gunawan
Nur Rohmah & Riza Hayati Ifroh
Ratih Wirapuspita Wisnuwardani
Yulian Widya Saputra & Muhammad Azmi

Membaca Ibu Kota Negara

secara Multidisiplin

Kata Pengantar

Ibu Kota Negara adalah reprsentasi dan simbol dari sebuah kondisi suatu negara. Ia tidak hanya merepresentasikan kondisi sosial budaya, politik, dan ekonomi, akan tetapi mencerminkan kondisi geopolitik dan Hankam negara. Bagaimana tidak, seluruh aktivitas politik dan pemerintah-an, ekonomi, dan relasi bilateral antara negara terpusat di dalam Ibu Kota Negara. Terkait dengan posisi-posisi dan isu strategis serta berbagai faktor pendorong lainnya, pemindahan Ibu Kota suatu negara haruslah membutuhkan proses pengkajian panjang dan matang. Pertimbangannya bukan saja atas dasar faktor ekonomi dan politik saja, akan tetapi banyak aspek yang harus dipertimbangkan.

Dalam banyak laporan disebutkan bahwa ada sekitar 13 negara di dunia yang telah berhasil memindahkan Ibu Kota negaranya, beberapa diantaranya adalah, Amerika, Jerman, Italia, Arab Saudi, Brazil, Australia, Kanada, Rusia, India dan beberapa negara lainnya (https://nasional.okezone.com). Di samping ada yang berhasil, ada pula yang gagal memindahkan Ibu Kota Negaranya, meskipun infrastrukturnya telah dibangun, yaitu Myanmar, Tanzania dan Malaysia (https://www.tagar. id/daftar-negara-gagal-dan-berhasil-pindahkan-ibu-kota). Kasus-kasus ini harus menjadi dasar dan rujukan bagi kita Negara Indonesia yang juga merencana melakukan pemindahan Ibu Kota.

Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) dari Jakarta ke Sepaku, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur bukan lagi sekedar wacana, akan tetapi telah diumumkan secara resmi oleh Presiden Jokowi pada tanggal 26 Agustus 2019. Ditegaskan bahwa pemindahan IKN akan dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024. Kebijakan pemindahan IKN bukan tanpa alasan, akan tetapi didasari oleh berbagai pertimbangan sebagaimana telah disebutkan sebelum nya. Baik pertimbangan secara geografis, geososial, geopolitik, ekonomi dan berbagai pertimbangan lainnnya terkait dengan kondisi Ibu Kota Indonesia di Jakarta saat ini tingkat kepadatan dan polusi yang sudah sangat tinggi.

Namun demikian tidak berarti bahwa pandangan-pandangan, atau masukan dan sumbangsih dari berbagai pihak dengan berbagai perspektif tidak penting lagi, khususnya dari berbagai perguruan tinggi. Sebaliknya, ruang bagi pengkajian rencana pemindahan Ibu Kota Negara Indonesia masih terbuka lebar sebab rencana pemindahannya masih dalam proses awal atau baru peletakan batu pertama sebagai Titik Nol IKN.

Asumsinya adalah kajian-kajian akademik dari berbagai disiplin ilmu perlu dilakukan guna meminimalisir dampak buruk dari berbagai aspek, yaitu

secara sosial/kemasyarakatan/kemanusiaan, budaya/adat/tradisi atau aspek lokal-kultur, politik, keterkaitan antara tatanan hukum nasional dan hukum adat, kesehatan, aspek lingkungan atau kelestarian alam/hutan, pendidikan, perekonomian masyarakat lokal, karakter dan kepribadian anak-anak, dan lain sebagainya.

Berangkat dari argumen dan berbagai alasan di atas, maka perlu membuat kajian yang muaranya tidak hanya penting bagi pihak pemerintah selaku penyelenggara negara, akan tetapi penting dan berguna juga untuk masyarakat luas (khususnya masyarakat lokal/adat). Untuk itu, para dosen di Universitas Mulawarman membuat buku ini dari berbagai disiplin ilmu dimaksudkan sebagai upaya partisipasi perguruan tinggi dalam memberikan berbagai pemikiran yang solutif dan inovatif terkait dengan rencana pemindahan Ibu Kota Negara Indonesia.

Samarinda, Agustus 2022

Tim Editor

Daftar Isi

Halaman Sampul i
Kata Pengantar vii
Daftar Isi ix

Migrasi, Diskriminasi, dan Modal Sosial: Upaya Menemukan Kurikulum Sekolah Adaftif terhadap Keberagaman
Andi Wahyu Irawan 1

Jejak Api di Calon Ibu Kota Negara
Ali Suhardiman, Ariyanto & Yohanes Budi Sulistioadi 19

Prospek Akselerasi Eliminasi Malaria di Kawasan Ibu Kota Baru
Rahmat Bakhtiar & Krispinus Duma 31

IKN, Momentum Mengoreksi Sistem Budidaya Pertanian, Mengarustengahkan Bahan Organik dan Pertanian Berkelanjutan
Suria Darma 39

IKN di Kalimantan Timur: Analisis Isu Pertahanan-Keamanan dan Geopolitik dalam Dimensi Hubungan Internasional
Rendy Wirawan 51

Menangkal Obesitas dengan Rekayasa Lingkungan Obesogenik (Health City Approach)
Danial & Isradi Zainal 63

Keanekaragaman Hayati di Kawasan IKN, Strategi Pengelolaan dan Perlindungan
Paulus Matius 75

Seni Tradisi sebagai Penguatan Literasi Budaya di IKN
(sebuah Pendekatan Etnomusikologis)
Asril Gunawan 83
Siapkah Ibu Kota Negara Menjadi Rumah Bebas dari Asap Rokok?
Nur Rohmah & Riza Hayati Ifroh 93

Kekuatan Masyarakat Kaltim dalam Penanganan dan Pencegahan Stunting Selama Pandemi Covid-19
Ratih Wirapuspita Wisnuwardani 107

Potensi Bencana IKN dan Harapan Masa Depan
Yulian Widya Saputra & Muhammad Azmi 121

Biodata Penulis 131

Migrasi, Diskriminasi, dan Modal Sosial: Upaya Menemukan Kurikulum Sekolah Adaptif terhadap Keberagaman

Andi Wahyu Irawan
FKIP, Universitas Mulawarman

Abstrak

Kota Samarinda menjadi kota yang penting di Kalimantan karena sebagai pusat pemerintahan di Kalimantan Timur sekaligus menjadi penyangga calon Ibu Kota Negara Indonesia. Sebagai daerah yang kaya dengan sumber daya alam, Samarinda memikat para migran dari penjuru Indonesia. Migrasi tersebut mempertemukan antara suku asli dan pendatang. Pada proses pertemuan antar suku, terjadi pembauran dan diskriminasi pada beberapa bentuk, misalnya tidak adanya kebijakan afirmatif terhadap suku asli sehingga mereka sulit bersaing dengan para migran, terutama pada sektor yang membutuhkan keterampilan tinggi. Meski begitu, selama lima tahun terakhir, tidak ditemukan konflik bernuansa etnik di Samarinda, bahkan ketika struktrur sosial sudah mulai berubah, misalnya pada sektor strategis, pendatang mendapatkan posisi pemimpin. Artinya, suku asli memiliki keberterimaan yang cukup tinggi, sekaligus praktek pengelolaan keberagaman yang cukup baik menjadi modal sosial dalam membentuk seperangkat nilai sosial untuk bisa bekerjasama agar bisa maju dengan kekuatan sendiri. Tulisan ini ingin menelusuri bagaimana proses migrasi dan diskriminasi itu terjadi serta modal sosial yang melingkupinya, sehingga bisa dijadikan sebagai landasan untuk menentukan poin penting dalam merancang kurikulum sekolah yang lebih adaptif terhadap kondisi sosial-budaya dan perkembangan zaman. Pada era saat ini, diperlukan pendidikan kritis sebagai kerangka paradigma dalam merancang kurikulum yang adaptif dalam menghadapi masalah sosial, termasuk diskriminasi. Konsep kunci pendidikan kritis adalah sikap kritis terhadap *totalitarisme* menggunakan identitas primordial dan pola pikir neoliberalisme.
Kata Kunci: Migrasi, Diskriminasi, Modal Sosial, Kurikulum

A. Pengantar

Kajian dari Pusat Penelitian Kependudukan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), menemukan fakta bahwa daerah Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur, merupakan daerah dengan tingkat keberterimaan masyakat yang

cukup tinggi. Atas pertimbangan tersebut, Presiden Joko Widodo memutuskan untuk memilih sebagian daerah PPU dan Kutai Kartanegara sebagai calon ibu kota baru (Herry Yogaswara, 2019). Dari sudut pandang sejarah migrasi, dua daerah tersebut menunjukkan perjumpaan antar etnis yang cukup bagus. Hampir semua daerah di Kalimantan Timur, menjadi tempat migrasi bagi suku Bugis, Jawa, Madura, dan suku lainnya. Belakangan migrasi besar-besaran terjadi terutama ketika maraknya tambang dan perkebunan.

Para migran memberi warna kebudayaan dan dinamika sosial ekonomi beragam bagi perkembangan Kalimantan Timur sebagai sebuah daerah dengan potensi sumber daya alam yang kaya. Sudah menjadi pengetahuan bersama jika pembentukan sebuah kota dipengaruhi oleh para migran (Gillbert, 1996). Akan tetapi, sebagai sebuah daerah migran, Kalimantan Timur memiliki proses tersendiri. Terutama strategi para migran beradaptasi dengan dinamika perkembangan kota. Jaringan sosial para migran mendukung proses interaksi dan hubungan sosial di kota Kalimantan Timur. Implikasi dari interaksi itu memunculkan kantong-kantong komunitas dan pengelompokan berdasarkan etnis dan pekerjaan (Izzah, 2011).

Salah satu suku yang populasinya cukup tinggi di Kalimantan Timur adalah suku Bugis. Gelombang migrasi orang Bugis ke Kalimantan Timur dimulai setelah penandatanganan Perjanjian Bongaya antara Sultan Hasanudin dan Belanda. Perjanjian itu menyebabkan perpecahan di kalangan kubu Hasanudin. Sebagian yang tidak menyetujui perjanjian tersebut memilih untuk meninggalkan pulau Celebes (Sulawesi). Mereka berlayar mencari daerah baru dipimpin oleh La Mohang Daeng Mangkona. Orang Bugis tiba di Samarinda, Kalimantan Timur pada 21 Januari 1668 yang kemudian dijadikan sebagai hari lahir kota Samarinda. Atas kebijakan Sultan Kutai, migran Bugis mendapatkan tanah suaka di Samarinda Seberang (dulunya disebut sebagai daerah Mangkupalas). Sultan Kutai ketika itu memilih daerah tersebut dengan pertimbangan; daerah yang subur untuk pertanian dan perikanan. Fasilitas tersebut diberikan oleh Sultan Kutai, namun dengan syarat, orang Bugis bersedia membantu kepentingan Raja Kutai, termasuk menghadapi musuh. Berselang beberapa waktu, orang Bugis yang disebut oleh Tirtosudarno (2008) sebagai migrasi suku Bugis gelombang baru, menyebar disekitaran sungai Mahakam, termasuk di sekitar teluk Balikpapan, yaitu daerah sekitar daerah Kutai Kartanegara dan PPU.

Migran etnis Jawa datang belakangan daripada Bugis, pada akhir tahun 1960-an, ketika itu pemerintah mencanangkan program transmigrasi dari pulau Jawa ke Kalimantan, dengan pertimbangan pemerataan populasi penduduk dan kesempatan kerja. Mereka berasal dari Jawa Timur, di daerah Madura, Magetan, Madiun, dan Blitar. Selain kesempatan kerja, alasan jarak Jawa dan Kalimantan timur yang lebih dekat,

ongkos transportasi yang murah dan durasi perjalanan yang relatif tidak terlalu lama, membuat migran etnis Jawa berbondong-bondong bermigrasi ke Kalimantan.

Pertemuan antar dua etnis tersebut membuat mereka hidup berpusat membentuk kampung-kampung berdasarkan identitas etnis dan kedekatan primordial. Para migran merasa terhubung dengan sebuah jaringan sosial tertentu. Studi mengenai bagaimana adaptasi para migran di kota yang semakin padat pernah dilakukan Jellinek (1994) pada tahun 1971-1981 di perkampungan Jakarta. Pendekatan intensif dan spesifik di salah satu kampung Jakarta waktu itu menunjukkan karakteristik hubungan sosial para pendatang. Munculnya pondok komunal adalah sebagai sarana tempat tinggal sementara para migran asal desa yang mencari nafkah di kota. Mereka tinggal secara komunal dan menjalin ikatan sosial yang kuat selama bertahan hidup di kota. Ikatan sosial tersebut mengurangi beban segala ketidakpastian bekerja di sebuah daerah baru.

Aktivitas mencari nafkah yang padat dan rasa komunal (Jellinek 1994) dalam komunitasnya itu menghalangi para migran berbaur secara sosial dengan para anggota masyarakat lain. Mereka, migran dari desa, menjalin hubungan kuat layaknya hubungan kekerabatan seperti saat masih di desa. Strategi bertahan para migran tersebut, memberi sebuah gambaran tentang masyarakat — berpagar. Para migran cenderung menggunakan strategi bertahan dengan menggunakan jaringan sosial kelompoknya. Mereka seakan membuat sebuah pagar sosial dalam ikatan kelompok, baik secara geografis maupun pemilihan terhadap pekerjaan. Semakin kuat jaringan sosial etnis para migran semakin memudahkan urusan sosial ekonomi, terutama untuk mendapatkan pekerjaan di kota. Realitas pengelompokan tempat tinggal para migran berdasarkan etnis seperti digambarkan oleh Jellinek di Jakarta itu juga tampak dalam kehidupan para migran dibeberapa kota di Kalimantan Timur, tidak terkecuali Kota Samarinda. Penelitian Jellinek menunjukkan sebuah kondisi yang rentan terjadi diskriminasi.

B. Diskriminasi terhadap Pribumi

Pendekatan jejaring sosial etnis yang menjadi modal sosial dalam mempermudah urusan sosial ekonomi, akan menjadi ancaman bagi etnis yang identitasnya berbeda. Semangat primordial dengan membangun jejaring sosial etnis atas dasar mendapatkan pekerjaan di tanah rantau, ditambah lagi stereotipe yang melekat pada etnis tertentu, membuat akses untuk mendapatkan sumber daya, semakin sulit. Penelitian Jellinek sebenar sudah mengkonfirmasi ini, bahwa diskriminasi akan terjadi dalam bentuk identitas etnik.

Konflik yang terjadi di Penajam Paser Utara (PPU) antara suku Bugis

dan suku Dayak bisa menjadi contoh karena disinyari menjadi puncak dari rasa kecewa suku Dayak (suku asli) yang mengalami diskriminasi. Meskipun tidak menggeneralisir bahwa semua suku Dayak mengalami diskriminasi, tapi beberapa contoh dibawah ini, difokuskan pada suku Dayak yang mengalami diskriminasi disebabkan karena penulis memiliki data dan pengalaman yang mendukung penjelasan tersebut. Tidak menutup kemungkinan suku asli lain juga mengalami diskriminasi.

Contoh pertama adalah kasus kericuhan di Pelabuhan PPU antara suku Dayak dan suku Bugis. Kronologi terjadinya kericuhan di PPU yang menyebabkan 146 rumah warga dibakar oleh massa, diduga diawali oleh dua orang anak muda yang saling bertikai disebabkan karena salah satu (korban, inisial Ch) dari anak muda itu meng-geber gas sepeda motor yang menimbulkan kebisingan. Karena tidak terima, pelaku (inisial Rn) mengajak korban untuk ketemu di pantai Nipah-nipah. Malam harinya, kedua anak muda tersebut kemudian bertemu di Pantai Nipah-nipah dengan membawa teman-temannya. Kedua kelompok anak muda itu membawa senjata tajam, hingga akhirnya saling tikam. Ch tidak bisa diselamatkan akibat luka tusukan, sementara Rn, harus dirawat intensif di rumah sakit. Keesokan harinya, kelompok anak muda yang terlibat dalam kasus tersebut, diamankan oleh kepolisian.

Satu minggu kemudian, tepat pada tanggal 16 Oktober 2019, ratusan massa berkumpul di pelabuhan PPU dengan membawa senjata tajam. Diduga ada kaitannya dengan peristiwa penikaman kedua anak muda. Ch yang menjadi korban merupakan anak dari tokoh adat suku Dayak Paser. Menurut kabar (M. Syafruddin, Kepala Biro Humas Setprov Kalimantan Timur), penikaman tersebut murni tindakan kriminal, namun karena keluarga korban merasa tidak terima, maka kasus tersebut disangkut pautkan dengan identitas kesukuan.

Menanggapi hal tersebut, Yuni Sadriah (Tirto.co) berpendapat bahwa kasus kerusuhan yang terjadi di ibu kota baru, merupakan akumulasi kemarahan dan kekecewaan masyarakat adat yang selama ini terpinggirkan karena selama ini masyarakat adat hanya menjadi penonton di wilayah mereka sendiri. Kekayaan alam hanya dinikmati pengusaha dan pejabat atau pemerintah.

Ketika mempertimbangkan PPU sebagai calon ibu kota baru, masyarakat adat suku Dayak Paser tidak dilibatkan. Tidak ada urun rempuk dengan masyarakat PPU. Tidak adanya ruang dialog tersebut, membuat keputusan pemindahan ibu kota negara terkesan satu arah dan tidak berdasarkan atas pendapat dan situasi masyarakat. Ditambah lagi dengan konflik lahan dan kerusakan hutan yang masih terus terjadi, menggerus kebudayaan orang Dayak, membuat identitas mereka semakin hari semakin bergeser. Mirisnya, orang Dayak dikambing hitamkan atas persoalan ini. Mereka

dituduh merusak hutan karena aktivitas ladang yang berpindah dianggap justru merusak hutan. Hutan yang menjadi sumber kehidupan mereka, dijarah oleh pengusaha dan pemerintah. Keserakahan mereka bukan main-main. Lahan yang seharusnya digunakan oleh orang Dayak untuk mencari kehidupan, kini berubah menjadi tambang dan kepala sawit.

Dari kondisi tersebut, orang Dayak merasa geram karena sumber kehidupan dan kebudayaannya disingkirkan. Upaya sudah dilakukan dalam melestarikan budaya mereka, salah satunya adalah meminta minimal 10 hektare untuk hutan adat dan 5 hektare lahan per keluarga, demi menjamin kebudayaan mereka agar tetap bertahan ditengah gempuran sawit, tambang, dan pembangunan ibu kota baru. Ada alasan yang kuat mengapa mereka meminta lahan ke pemerintah. Dagut H. Djunas mengatakan saat ini kehidupan Suku Dayak semakin terjepit karena lahan dan hutan adat--sumber utama penghidupan mereka semakin sempit.

Permintaan lahan tersebut, merupakan upaya dari masyarakat adat agar diakui pemerintah yang selama ini tersisihkan dalam ruang sosial. Pemerintah perlu mengakomodir permintaan tersebut sebagai bentuk pengakuan kehadiran masyarakat dan dan upaya untuk mencegah terjadinya konflik horizontal. Dibalik puncak kemarahan suku Dayak Paser dalam kerusuhan PPU, terselip permintaan yang mendalam kepada pemerintah, agar tetap menjaga dan mempertahankan identitas kebudayaan mereka, yaitu menjamin kegiatan berburu, memungut hasil hutan, meramu, dan melakukan kegiatan religius melalui pemberian lahan kepada mereka.

Kondisi masyarakat dayak Paser di PPU saat ini kebanyakan tinggal di desa-desa karena di kota banyak didiami oleh pendatang. Desa mereka pun banyak dikuasai oleh sawit dan tambang. Jika ke sana, nampak sekali perbedaan kondisi sosial antara masyarakat lokal dan pendatang. Bisa dilihat dari kondisi rumah mereka.

"Bak tikus mati dilumbung padi", sepertinya pepatah ini tepat untuk mewakili kondisi masyarakat pribumi di Kalimantan Timur. Mereka yang seharusnya hidup sejahtera ditengah kekayaan alam yang melimpah, justru harus menerima kenyataan pahit. Mereka perlahan-lahan tercerabut dari akar budayanya, bermigrasi untuk mendapatkan kehidupan yang layak, tidak memiliki akses untuk hidup sejahtera, dan bersaing dengan warga pendatang yang bisa jadi memiliki kompetensi lebi baik dari mereka.

Kemiskinan yang dimaksud tidak hanya sebatas ketidakmampuan ekonomi, tetapi juga kegagalan memenuhi hak-hak dasar dan perbedaan perlakuan bagi seseorang atau sekelompok orang dalam menjalani kehidupan secara bermartabat. Hak tersebut meliputi terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumberdaya-alam, dan

lingkungan hidup, rasa aman dari perlakukan atau ancaman tindak kekerasan dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial-politik, baik bagi perempuan maupun laki-laki. Perampasan hak-hak tersebutlah yang disebut sebagai proses pemiskinan (Giddens, 2005). Ketika orang Dayak sulit mendapatkan akses kesehatan karena jarak antara pemukiman mereka dan rumah sakit jaraknya cukup jauh, sekolah tinggi yang harus ditempuh berpuluh-puluh kilo dari kampung bahkan hingga pergi merantau, dan perlakuan yang diskriminatif, disaat itu pula orang Dayak terpinggirkan dalam komunitas sosial.

Suku Dayak semakin terjepit karena lahan dan hutan adat — sumber utama penghidupan mereka semakin sempit. Lahan-lahan mereka berubah jadi kebun kelapa sawit dan tambang. Berdasarkan data statistik, sawit adalah komoditas perkebunan dengan penggunaan lahan terluas. Tahun lalu, lahan sawit di Kaltim mencapai 898.947 hektare, naik lebih dari 100 hektare dibanding 2014 yang luasnya 'baru' 761.119 ha. Di PPU, luas lahan sawit tahun 2019 mencapai 44.670 hektare. Ini jauh lebih luas dibanding kebun karet dan kelapa yang luasnya masing-masing 11.016 hektare dan 4.318 hektare. Luas izin tambang dan batu bara bahkan lebih luas dari luas daratan di Kaltim. Berdasarkan data dari Jatam (Jaringan Advokasi Tambang), luas izin lahan di Kaltim mencapai 13,83 juta hektare, padahal luas daratan hanya 12,7 juta hektare (BPS, 2019).

Dayak bahkan masih dianggap sebagai masyarakat primitif, yang masih berburu kepala, pengelompokan sosial di rumah panjang, memburu dan mengumpulkan, serta adanya ritual-ritual kematian (Maunati, 2012). Sehingga hal ini masih rentan menimbulkan marjinalisasi. Marjinalisasi yang terjadi, yaitu dari sudut pandang elit, masyarakat primitif, mereka agak mirip dengan petani desa biasa, tetapi dengan beberapa ciri khas (Tsing, 1998).

Pada akhirnya, kepungan dari segala arah memaksa orang Dayak untuk berada dalam pusaran kemiskinan. Korporasi, pengusaha dan pemerintah bersekongkol untuk menjarah kekayaan alam mereka. Ketika stigma mengenai orang Dayak dan tudingan sebagai perusak hutan ditujukan kepada mereka, maka disaat itu pula, Dayak semakin terhimpit didalam ruang sosial. Mereka sulit untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Kebiasaan mereka berladang dan meramu, perlahan-lahan hilang, ditelan keserakahan. Bagaimana mungkin bisa berladang dan meramu, jika hutan yang mereka rawat turun temurun dijadikan tambang dan sawit?

Bukan hanya persoalan lahan dan tergerusnya kebudayaan Dayak, hingga kasus kerusuhan bernuansa etnis di Pelabuhan PPU, aspek pendidikan juga perlu dilihat sebagai bagian yang penting. Sejarah perjalanan pendidikan pribumi dalam hal ini suku Dayak, mengalami banyak dilema. Dilema pendidikan suku Dayak

ditulis Thambun Anyang (1998) dimana dijelaskan bahwa pada era kolonial, masyarakat suku Dayak tidak memiliki banyak peluang untuk mengenyam dan melanjutkan jenjang pendidikan. Sekolah-sekolah pada masa itu kebanyakan adalah sekolah milik Belanda dan milik kesultanan-kesultanan Melayu.

Hanya sekolah-sekolah milik Gereja Katolik atau Seminari yang relatif bisa menerima etnis Dayak. sehingga tidak heran pada zaman yang sudah maju sekarang ini angka buta huruf untuk golongan tua rasionya lebih besar. Bahkan hingga saat ada dari golongan tua atau orang-orang tua yang masih produktif saat ini tidak pernah merasakan duduk di bangku pendidikan. Ditambah lagi dengan citra-citra negatif yang diasosiasikan dengan orang-orang Dayak masih berlaku hingga sekarang.

Meskipun saat ini anak-anak suku Dayak sudah bisa mengenyam pendidikan tinggi, namun diskriminasi masih saja terus terjadi. Di kampus tempat penulis mengabdi misalnya, Dayak sering diasosiasikan dengan sesuatu yang negatif. Tidak jarang mahasiswa/i Dayak harus menerima stigma negatif. Padahal, jelas dalam undang-undang bahwa setiap warga negara berhak atas pendidikan, tanpa membedakan ras atau etnis apapun.

Ketika pemerintah mencanangkan pendidikan untuk semua, anak-anak Dayak harus melewati jalan terjal untuk bisa sampai ke sekolah. Ini disebabkan karena secara demografi, orang Dayak tinggal di hutan atau di pinggir sungai, yang sulit diakses. Ketika anak suku Dayak ingin melanjutkan sekolah, mereka harus keluar dari kampung halamannya, merantau, dan bisa jadi tercerabut dari identitas Dayaknya. Disaat itu pula, pendidikan harus bertanggung jawab terhadap hilangnya identitas Dayak di generasi muda. Pembangunan pendidikan harus disamaratakan hingga ke pelosok. Sudah cukup kebudayaan Dayak yang begitu menderita karena proyek pemberadaban yang dilancarkan oleh kolonial hingga pemerintah Indonesia.

C. Modal Sosial, Bertahan dalam Keberagaman

Perlunya menelusuri catatan sejarah migrasi di kota Samarinda untuk melihat sejauhmana kondisi multikultural berjalan sinergi tanpa konflik, termasuk bagaimana peran penduduk asli dalam menerima kedatangan para migran, menjadi bagian dari puzzle sejarah yang perlu disatukan untuk melihat masa depan pengelolaan keberagaman yang lebih baik. Bukan hanya kejadian konflik di pelabuhan PPU yang baru-baru ini terjadi yang bisa dijadikan sebagai bukti masih perlunya pengelolaan keberagaman yang baik. Kasus yang sama terjadi pada tahun 2012, tidak jauh dari kota Samarinda, terjadi konflik antar suku Dayak dan suku Bugis di Kutai Barat, meskipun dikonfirmasi oleh tokoh kedua suku bahwa konflik tersebut murni kasus kriminal. Contoh lain, ekskalasi konflik yang lebih luas, atas nama identitas etnik

pernah terjadi di Kalimantan Tengah, tepatnya di Sambas.

Patut kita renungkan bersama mengapa konflik antara suku asli dan pendatang masih saja terjadi. Ketika kita melihat dari sudut pandang kondisi kota Samarinda, dalam rekam jejak digital, tidak pernah terjadi konflik antar etnik dalam lima tahun terakhir. Padahal, beberapa sektor strategis seperti pemerintahan, bisnis, hingga ranah pendidikan, dikuasai oleh orang pendatang, kok bisa masyarakat kota Samarinda justru tetap hidup rukun?

Jika merujuk pada riset Rosdiawan, dkk. (2007) yang meneliti mengenai konflik di Kalimantan Barat, ditemukan bahwa *etnosentrisme* menjadi faktor yang turut menentukan bagi memanasnya suhu interaksi sosial antara suku Dayak dengan suku lainnya. Cara pandang superioritas etnis dan anggapan bahwa etnis sendiri yang paling berhak atas akses sosial, ekonomi, politik, dan sumber daya telah menciptakan sebuah pola interaksi yang canggung.

Masing-masing kelompok mengantongi catatan tentang kelompok lain dan membukanya sebagai DAFTAR PUSTAKA ketika melakukan pembauran. Sehingga ketika terjadi clash walau skalanya kecil dalam interaksi dengan mudahnya konflik pun meluas dan melebar. Terbentuknya etnosentrisme di Kalimantan Barat bukan sebuah proses satu malam. Ia terpatri melalui rangkaian dialektika sejarah yang panjang. Pasang suru etnosentrisme dalam proses interaksi selalu ditandai dengan konflik.

Kondisi Kalimantan Barat tidak jauh berbeda dengan kondisi Samarinda, terutama kondisi multikultural. Yang membedakan antar keduanya adalah sejarah migrasi. Bantuan yang diberikan Sultan Kutai kepada suku Bugis ketika pertama kali menginjakkan kaki di Samarinda, dibalas dengan dukungan suku Bugis untuk melawan musuh, merupakan simbiosis mutualisme dan menjadi ingatan kolektif generasi setelahnya. "Hutang budi" tersebut yang menjadi jejak historis mengapa suku asli dan pendatang mampu hidup dalam harmonis.

Ingatan kolektif tersebut menjadi modal sosial. Modal sosial merujuk pada kelompok masyarakat yang memiliki seperangkat nilai sosial dan nilai budaya yang mementingkan kerjasama sehingga dapat maju dengan kekuatan sendiri (Syahra: 2003). Jika melihat kondisi kota Samarinda, maka modal sosial yang paling besar adalah ingatan kolektif masyarakat mengenai sejarah migrasi mereka serta keberterimaan suku asli.

Suku Dayak yang sejarah kebudayaannya adalah meramu dan berburu, menerima suku pendatang dengan begitu terbuka, meskipun terjadi gejolak konflik di Kalimantan Barat yang disinyalir disebabkan karena *etnosentrisme*, tapi justru itu tidak terjadi di kota Samarinda. rivalitas dan konflik di Kalimantan Barat antara Dayak dan Melayu terkonsentrasi pada kompetisi dalam bidang sosial politik, Dayak dan Cina

berkompetisi pada bidang ekonomi-politik, serta Dayak dan Madura dalam sosial-politik (Anwar & Bachtiar, 2004).

Temuan Rosdiawan, dkk (2007), menemukan bahwa kerusuhan massal yang melibatkan etnisitas di Kalimantan Barat hanya terjadi antara kelompok-kelompok etnis yang sebenarnya merupakan pihak-pihak yang juga potensial. Misalnya, belum terjadi kekerasan etnis diantara sesama pendatang - minoritas (Cina *vs* madura), diantara penduduk asli-mayoritas versus pendatang - minoritas lainnya (Melayu *versus* China), dan terutama diantara sesama penduduk asli-mayoritas (dayak *versus* melayu). Data ini menunjukkan fakta bahwa tidak ditemukan konflik horizontal antar mayoritas vs mayoritas dan minoritas vs minoritas.

Menguatnya organisasi masyarakat bernuansa kesukuan dan kepemudaan di Samarinda juga menegaskan penelitian Rosdiawan tersebut. Dalam catatan lima tahun terakhir, tidak ditemukan konflik antar organisasi masyarakat, baik yang terjadi antar kelompok mayoritas vs mayoritas dan minoritas vs minoritas. Justru organisasi masyarakat semakin menguat. Hal ini pula yang menjadi modal sosial di Samarinda karena organisasi masyarakat menjadi benteng dalam mengelola beragaman.

Pada konteks keagamaan, peran Forum Kerukunan Antar Umat Beragama (FKUB) juga turut andil dalam penguatan modal sosial di masyarakat. Intensitas pertemuan yang dilakukan oleh FKUB bersama dengan tokoh lintas agama, membuat rasa solidaritas semakin menguat. Wawancara yang penulis lakukan dengan ketua FKUB kota Samarinda, menemukan fakta bahwa pengelolaan keberagamaan di Kota Samarinda dilakukan dengan membuat kegiatan lintas keagamaan sehingga dialog sering terjadi untuk terus menjaga komunikasi lintas agama.

Ketika pertama kali tiba di Samarinda dua tahun yang lalu, penulis menemukan praktek keberagaman. Antar suku asli dan pendatang, hidup harmonis. Secara kasat mata, tidak ditemukan adanya kecemburuan sosial yang mengatas namakan identitas kesukuan, dibuktikan dengan tidak adanya sentimen dalam bentuk verbal maupun tindakan yang mengarah pada kesukuan. Meskipun kadang identitas kesukuan dijadikan sebagai strategi politik oleh politisi untuk mendapatkan dukungan.

Politik identitas justru tidak terjadi di kampus tempat penulis mengabdi. Rektor Universitas Mulawarman berasal dari suku Mandar. Beberapa posisi strategis di kampus juga dipimpin oleh suku pendatang, tidak terkecuali Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan tempat penulis mengajar. Hal ini menunjukkan keberterimaan penduduk asli kepada pendatang.

Perlunya mendesain suatu pendekatan yang komprehensif dalam membaca pengelolaan keberagaman ini sebagai sebuah modal sosial yang diadopsi dalam dunia pendidikan. Pendidikan dianggap sebagai miniatur masyarakat

multikultural yang mempertemukan antar budaya yang berbeda. Oleh karena itu, penting untuk mendesain kurikulum yang adaptif terhadap keberagaman.

D. Pedagogi Kritis, Kurikulum Adaptif terhadap Keberagaman

Kurikulum merujuk pada pengertian seperangkat mata pelajaran dan program pendidikan yang diberikan oleh lembaga penyelenggara pendidikan yang berisi rancangan pelajaran yang akan diberikan kepada peserta didik dalam satu periode (Syaodih: 2000). Dalam proses penyusunan seperangkat mata pelajaran tersebut, harus di sesuaikan dengan kondisi sosial-budaya dan kemampuan peserta didik.

Ahmad Baedowi (2013) menawarkan rancangan kurikulum untuk menanamkan perasaan kebangsaan yang dewasa dalam pengelolaan keberagaman melalui integrasi pembelajaran agama dan pendidikan kewarganegaraan menjadi satu paket. Penekanan pembelajaran tersebut pada proses pendidikan yang secara sadar menyadarkan guru dan siswa untuk menjaga keberagaman. Lebih jauh, Baedowo menawarkan pendidikan kritis sebagai solusi atas keberagaman di sekolah.

Merujuk pada Giruoux (2011), tokoh pendidikan kritis, menjelaskan bahwa pedogogi kritis harus memberikan kesadaran mengenai relasi sosial yang didasarkan pada nilai, budaya, dan tradisi selalu memiliki implikasi politik di antara pemegang kekuasaan. Karena itu proses pendidikan mengharuskan dirinya untuk menggunakan basis kemajemukan tersebut sebagai cara mengkomunikasikan perbedaan secara benar dan cerdas dalam kerangka kehidupan berbangsa dan bernegara.

Konteks pedagogi kritis dengan lokus di Kota Samarinda, menekankan pada kepekaan terhadap persoalan sosial yang ada di masyarakat, terutama sikap kritis terhadap kecenderungan totalitarisme menggunakan identitas primordial seperti yang dijelaskan sebelumnya mengenai identitas kesukuan, dan kecenderungan menyebarkan pola pikir neoliberalisme. Totalitarisme identitas primordial yang menganggap bahwa sukunya paling unggul diatas segalanya dan tidak memberikan akses kepada suku lain untuk mendapatkan sumber daya merupakan akar masalah dari segala bentuk intoleransi. Ketika Samarinda mampu menjadi daerah dengan tingkat keberterimaan yang cukup tinggi, itu artinya *egalitarianisme* masih ada dalam masyarakat kita.

Kesadaran kritis dalam dunia pendidikan akan mendorong peserta didik agar mampu menjadi agen perubahan dan mendorong berbagai macam perubahan sosial. Lebih penting lagi, kurikulum yang adaptif dengan menggunakan kerangka pendidikan kritis, berupaya untuk menyadarkan peserta didik tentang siapa sebenarnya dirinya di dalam masyarakat. Identitas tersebut membuat peserta didik harus sadar mengenai tugasnya sebagai manusia. Tidak hanya sebatas pengetahuan semata, tetapi gerakan sosial dan kesadaran moral untuk menyelesaikan persoalan sosial menjadi titik kunci

pendidikan kritis.

Dalam merancang kurikulum yang adaptif, peserta didik setidaknya menyadari bahwa menjadi orang yang terdidik berarti bertanggung jawab untuk melakukan gerakan moral, yang berupaya untuk menjaga keberagaman kota Samarinda agar menjadi lebih baik. Sekolah-sekolah perlu menerapkan kebijakan yang memihak kepada kepentingan peserta didik. Pertanyaan kritis dan upaya peserta didik dalam melakukan perubahan sosial yang positif, perlu didukung melalui mekanisme regulasi sekolah yang adaptif.

Saran dari Baedowi untuk mengintegralkan matapelajaran pendidikan kewarganegaraan dan pendidikan agama sepertinya bisa menjadi pertimbangan. Pada matapelajaran pendidikan kewarga negaraan misalnya, dalam kurikulum 2013, perlu ditegaskan kompetensi inti dan kompetensi dasar dalam proses pembelajaran. Ada empat kompetensi inti dalam matapelajaran pendidikan kewarganegaraan. Pertama, sikap spiritual, kemudian sikap sosial, pengetahuan, dan terakhir keterampilan. Sikap spiritual dibagi kedalam empat kompetensi dasar, salah satu yang cukup menarik adalah menghargai perbedaan sebagai anugerah tuhan yang maha esa dalam rangka penghormatan hak asasi manusia. Pada prakteknya, kompetensi dasar ini sering ditafsirkan secara tekstual semata, tidak diaplikasikan dikehidupan nyata. Terlebih ketika guru tidak mencontohkan perilaku yang patut untuk dicontoh, maka lengkap sudah kegagalan kurikulum 2013 dalam menyikapi permasalahan sosial.

Tidak hanya penguatan pada matapelajaran pendidikan kewarganegaraan dan pendidikan agama melalui penanaman nilai agar tidak sekedar pemahaman tekstual, tetapi konselor sekolah (guru bimbingan konseling) perlu dilibatkan dalam proses menanamkan pendidikan kritis pada peserta didik. Konselor harus hadir sebagai sahabat bagi peserta didik, menjadi tempat curhat dan membantu dalam menemukan jati diri peserta didik.

Kerangka model konseling yang adaptif terhadap kondisi multibudaya sudah dikembangkan oleh Mappiare (2013) dengan menjadikan budaya sebagai instrumen utama dalam memberikan pelayanan konseling kepada peserta didik. Dalam merespon kondisi sosial-budaya yang semakin bergejolak, seperti diskriminasi antar satu sama lain, disintegrasi, disharmonisasi sosial, dan intoleransi, konseling modal KIPAS (Konseling Intensif, Progresif, Adaptif, dan Struktur) hadir sebagai jawaban atas segala persoalan tersebut. Pada intinya model ini dirancang agar proses konseling dapat beradaptasi pada kondisi struktur sosial-budaya masyarakat dan struktur sekolah.

KIPAS menawarkan lima tema bahasan yang menjadi fokus kajian dalam menyelesaikan persoalan sosial. Pertama adalah karakter, identitas, pekerjaan,

akademik, dan terakhir adalah sosial. Selama ini peserta didik tidak memiliki keseimbangan, keselarasan, dan keserasian dalam proses pembentukan karakternya. Identitas juga mengalami hal yang sama. Tidak adanya penegasan identitas membuat peserta didik menjalani kehidupan ini dengan tidak efektif.

Memang perlu kolaborasi keahlian dalam menangani persoalan keberagaman di dunia pendidikan, sehingga keberagaman kelak tidak menjadi bom waktu jika tidak ditangani dengan bijak. Sebagai kota dengan kondisi yang heterogen, Samarinda patut berbangga karena kasus konflik bernuansa identitas kesukuan tidak terjadi dalam lima tahun terakhir. Namun, gesekan sosial bisa saja terjadi dan bisa saja apa yang terjadi saat ini merupakan akumulasi dari sebuah konflik laten yang tidak dirasakan.

Untuk menangani kasus tersebut, seperti saran Giroux, sikap kritis harus dibangun di generasi muda atau peserta didik melalui "perlawanan" terhadap totalitarisme menggunakan identitas primordial. Ketika totalitarisme hidup dan berkembang di generasi muda, maka kebencian terhadap kelompok ekternal akan semakin meruncing. Beruntung karena kota Samarinda memiliki modal sosial yang mampu menghalau berbagai macam konflik yang mengatas namakan identitas.

Oleh karena itu sekolah harus hadir menjadi benteng terdepan dalam menanamkan toleransi. Kenapa diskriminasi selama ini hadir ditengah-tengah suku Dayak atau suku pribumi yang lain, karena tidak adanya sikap kritis yang dibangun di dalam masyarakat kita. Cenderung kita melegalkan segala cara atas nama kebijakan pemerintah untuk menyingkirkan kelompok minoritas karena telah menganggu akses terhadap sumber daya.

Sebagai pembuat regulasi, birokrasi perlu membuat kebijakan yang afirmatif kepada pribumi. Kebijakan tersebut mencakup tiga hal, akses terhadap sumberdaya, penyediaan lahan untuk merawat kebudayaan Dayak atau suku lain, dan peningkatan sumber daya manusia melalui pendidikan yang menekankan pada *output* dan *outcome* yang jelas.

Jika merujuk pada kebijakan pemerintah Australia (https://www.education.gov.au/indigenous-schooling) terhadap suku asli Aborigin dan masyarakat di kepulauan Selat Torres sebagai suku asli (pribumi) yang selama ini mengalami diskriminasi, maka kita bisa menemukan bentuk perhatian dan kepedulian terhadap pribumi. Pemerintah Australia melakukan reformasi dalam bidang pendidikan yang didasari dari data *review panel* yang dipublikasi pada 28 Maret 2019 dan mengajukan tiga rekomendasi, yaitu (1) memberikan pertumbuhan pembelajaran setidaknya satu tahun atau setiap siswa setiap tahun, (2) mempersiapkan setiap siswa untuk menjadi lebih kreatif, terhubung dan terlibat dalam dunia yang berubah dengan cepat, (3) mengembangkan dan adaptif, inovasi dan terus meningkatkan sistem pendidikan.

Dari data tersebut, melalui *Department of Education, Skills, and Employment,* dibuat kebijakan mempromosikan rekonsiliasi, memperkuat pengetahuan dan pemahaman siswa tentang sejarah, budaya, dan kontribusi kepada pribumi, yaitu suku Aborigin dan Kepulauan Selat Torres melalui program Narragunnawali: *Reconciliation in Schools and Early Learning Programe*. Dalam program tersebut, pemerintah Australia menggelontorkan sejumlah dana untuk meningkatkan partisipasi dalam pendidikan anak usia dini, meningkatkan kehadiran sekolah, meningkatkan kemampuan membaca, menulis dan berhitung, serta memastikan siswa menyelesaikan sekolah.

Tim program tersebut, yang disebut tim Narragunnawali mengembangkan kurikulum untuk suku Aborigin dan Kepulauan Selat Torres melalui area pembelajaran dengan fokus pada *civic citizenship, dance, drama, economic & busi, english, geography, health & physical education, history, languages, mathematics, media arts, music, science, techologies, visual arts, dan evaluating resources guide*.

Fokus area pembelajaran *sciense* misalnya, tim merancang kurikulum yang tetap mengutamakan kearifan suku Aborigin. Sciense tidak dibangun diatas keilmuan yang positivistik semata, tetapi dibangun dari sumber ilmu pengetahuan Aborigin. Hal ini dilakukan agar generasi penerus suku Aborigin bisa mengetahui kebudayaan mereka dalam kerangka pembelajaran *sciense*.

Di Amerika, untuk mendukung pengembangan siswa dari suku asli (pribumi), yaitu Indian, pemerintah disana membuat undang-undang untuk memberikan pendidikan berkualitas kepada suku asli. Alasannya, selama 10 tahun terakhir, siswa dari suku Indian tidak mengalami peningkatan yang signifikan dalam bidang membaca dan matematika untuk siswa SD kelas empat dan delapan ((NAEP, 2005, 2007, and 2009). Bahkan suku asli mengalami tingkat kelulusan yang cukup rendah yaitu dibawah 50% pada tingkat perguruan tinggi (The Civil Rights Project. 2010). Undang-undang *Native Culture, Language, and Access for Success* (CLASS) dirancang untuk mendukung peran suku Indian mengarahkan pendidikan siswa. Inti dari undang-undang tersebut adalah, (1) memperkuat kontrol suku asli atas pendidikan, (2) melestarikan dan merevitalisasi bahasa aslin, (3) menyediakn akses kepada suku asli (4) mendorong kemitraan antara suku dan negara bagian.

Hani Morgan (2009) mengembangkan panduan mengajar pada anak-anak suku Indian Amerika. Ia mengkritik banyak buku teks yang biasa digunakan karena menggambarkan penduduk asli Amerika yang memiliki budaya tidak beradab (Grant & Tate, 1995). Bagi Morgan, sekolah harus memberikan keadilan dan pengalaman positif kepada siswa. Morgan memperingatkan kepada guru mengenai bahaya *stereotipe*. Selama ini suku Indian sering mengalami *stereotipe* yang negatif dan dianggap tidak beradab. Penekanan Morgan pada pengajaran pada anak-anak suku Indian

adalah perlunya perlakuan yang khusus karena cara belajar suku Indian (suku asli) sangat berbeda dengan orang Amerika pada umumnya. Gaya pembelajaran yang disarankan oleh Morgan dalam menghadapi siswa dari suku Indian adalah gaya yang adaptif dan antisipatif. Guru harus mengamati terlebih dahulu sebelum mengasumsikan siswa suku Indian, lalu kemudian merespon sesuai dengan gaya belajarnya.

Pemerintah Indonesia sepertinya perlu menjadikan Australia dan Amerika sebagai salah satu rujukan dalam memberikan pendidikan kepada suku asli (pribumi) agar bisa memahami bagaimana seharusnya memperlakukan penduduk asli, tanpa diskriminasi dan intoleransi. Dengan modal sosial yang di miliki kota Samarinda, maka potensi untuk mengembangkan kurikulum yang adaptif terhadap keberagaman, masih terbuka lebar. Hanya saja pemerintah perlu memberikan perhatian khusus terhadap suku asli.

E. Kesimpulan

Pada bagian awal tulisan, dijelaskan mengenai proses migrasi suku pendatang ke kota Samarinda, hingga keberterimaan suku asli yang menerima para pendatang. Pada tahapan lebih lanjut, terjadi diskriminasi, misalnya suku Dayak tidak mendapatkan akses untuk mendapatkan sumber daya, mulai dari akses kesempatan (tidak adanya kebijakan afirmatif), penyediaan lahan untuk merawat kebudayaan, hingga akses pendidikan. Ditengah diskriminasi tersebut, terjadi konflik antar suku asli dan pendatang, terutama di sekitar kota Samarinda. Uniknya kota Samarinda yang jumlah penduduknya paling banyak di Kalimantan Timur, justru tidak pernah mengalami konflik selama lima tahun terakhir.

Konflik pada beberapa tempat di daerah sekitar kota Samarinda atas nama identitas kesukuan, dapat ditekan dengan cara pemerataan pembangunan hingga ke pelosok di mana penduduk asli tinggal. Ini memudahkan akses pada ekonomi dan pendidikan yang menjadi dasar bagi kemajuan suku tersebut.

Perlu adanya perhatian pemerintah terutama bidang pendidikan melalui kurikulum yang adaptif terhadap keberagaman, sehingga membuka akses kepada suku asli untuk bisa mengembangkan diri dan mengakses sumber daya.

Merancang kurikulum yang adaptif terhadap keberagaman dalam kerangka pendidikan kritis, seharusnya menyadarkan peserta didik untuk bisa melakukan gerakan sosial dan moral untuk menyelesaikan masalah sosial, tidak hanya sekedar pemahaman tekstual semata. Kurikulum tersebut harus pro terhadap suku asli dalam upaya untuk melestarikan kebudayaan mereka. Kebanggaan terhadap kebudayaan sendiri harus sudah ditanamkan sejak dini, melalui keluarga

dan juga sekolah.

Sekolah sebagai miniatur masyarakat dan sebagai arena pertemuan antar budaya, perlu memiliki kurikulum yang adaptif terhadap keberagaman. Pemerintah perlu memikirkan bagaimana menjaga kearifan lokal dan modal sosial sebagai kekuatan masyarakat dalam menyelesaikan persoalan sosial. Kebijakan harus dibangun atas dasar modal sosial, sebagai sebuah instrumen yang lahir dari masyarakat. Dengan begitu, keberagaman akan terus terjaga, hidup berbeda bukan menjadi persoalan, dan kita bangga dengan perbedaan itu.

Catatan:

1. Pertimbangan aspek sosial budaya pemindahan ibukota didasari atas karakter potensi konflik sosial rendah dan memiliki budaya terbuka terhadap pendatang.

2. Istilah bagi individu atau kelompok yang berpindah dari tempat satu ketempat yang lain melewati batas administrasi dengan tujuan untuk menetap.

3. Beberapa orang Bugis Wajo yang tidak setuju penandatanganan perjanjian Bongaya lari dari Makassar sesudah kekalahan Sultan Hasanuddin dengan Belanda.

4. Tokoh Bugis Wajo diklaim yang mendirikan pemukiman Samarinda Seberang

5. Tahun 1668 Sultan Kutai memerintahkan La Mohang Daeng Mangkona bersama pengikutnya membuka perkampungan di tanah rendah (sekarang daerah Samarinda Seberang), di pinggir sungai Mahakam

6. Tiga rekomendasi merupakan hasil laporan dari *review panel* yang terdiri dari David Gonski, Terry Arcus, dkk, yang dipublikasi dalam Through Growth to Achievement: *Report of rhe Review to Achieve Educational Excellence in Austalian Schools.*

7. Hasil rancangan tim Narragunnawali fokus pada tiga upaya pendidikan untuk suku asli, yaitu *reconciliation*, profesional learning, dan curriculum resources. Semua informasi tersebut bisa diakses di *narragunnawali.org.au*

Daftar Pustaka

Anyang, T. 1998. Kebudayaan dan Perubahan Daya Taman Kalimantan dalam Arus Modernisasi. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.

Asmara, U.H. 2002. Tragedi Konflik Madura-Dayak, Madura-Melayu, Di Sambas, Kalimantan Barat. Paper Dipresentasikan pada Seminar Konflik dan Modal Kedamaian Sosial, UIN Syarif Hidayatullah.

Baedowi, A. 2013. Paradoks Kebangsaan Siswa Kita. Hlm. 67-82. dalam Menghalau Radikalisasi Kaum Muda : Gagasan dan Aksi. Jurnal Maarif. Vol. 8, No. 1 07.

Gillbert, A. & Josef G. 1996. Urbanisasi dan Kemiskinan di Dunia Ketiga (terjemahan). Yogyakarta: Tiara Wacana

Giddens, A. 1997. Konsekuensi-konsekuensi Modernitas. Yogyakarta: Kreasi Wacana Giroux, H. 2011. On Critical Pedagogy. London: The Continuum International Publishing Group.

Grant, C. A., & Tate, W. F. 1995. Multicultural education through the lens of the multicultural education research literature. In J. A. Banks & C. A. M. Banks (Eds.), Handbook of research on multicultural education (pp. 145-166). New York: Macmillan.

Izzah, A. 2011. Jaringan Sosial dan Variasi Pekerjaan Para Migran di Kota Samarinda. Masyarakat, Jurnal Sosiologi. Vol. 16 No. 2 Juli

Jellinek, Lea. 1994. Seperti Roda Berputar: Perubahan Sosial Sebuah Kampung. Jakarta: LP3ES.

Mappiare-AT, A. (2013a). Penegasan Identitas Anak Bangsa Melalui Konseling Multibudaya Model KIPAS. Studium Jeneral kepada Dosen dan Mahasiswa Jurusan Bimbingan dan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi IAIN Sunan Ampel Surabaya. Surabaya.

Maunati, Y. 2012. Identitas Dayak, Komodifikasi dan Politik Kebudayaan. Yogyakarta: LkiS Morgan, H. 2009. What Every Teacher Needs To Know To Teach Native American Students. Summer. Multicultural Education

Pilin, M. & Edi, P. (1999). Hutan: Darah dan Jiwa Dayak. ed.1. Pontianak: CV. Mitra Kasih.

Rosdiawan, R, Hudi Z., Shaleh, IM., (2007). Merajut Perdamaian di Kalimantan Barat. Hlm. 20-109. dalam Revitalisasi Revitalisasi Kearifan Lokal ; Studi Resolusi Konflik di Kalimantan Barat, Maluku, dan Poso. Jakarta; International Center for Islam and Pluralism (ICIP).

Tsing, A.L. (1998). Di Bawah Bayang-bayang Ratu Intan: Proses Marjinalisasi pada Masyarakat Terasing, penerj. Meutia Farida Swasono, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Syahra, Rusydi. (2003). Modal Sosial: Konsep dan Aplikasi. Jurnal Masyarakat dan Budaya, Vol 5 (1): 1-22

Syaodih., Sukmadinata, Nana (2000). Pengembangan kurikulum: teori dan praktik. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Jejak Api di Calon Ibu Kota Negara

Ali Suhardiman, Ariyanto & Yohanes Budi Sulistioadi
Fakultas Kehutanan, Universitas Mulawarman
Pusat Pengembangan Infrastruktur Informasi Geospasial, LP2M, Universitas Mulawarman
Prodi Ilmu Lingkungan, Program Pascasarjana, Universitas Mulawarman

Pendahuluan

Provinsi Kalimantan Timur sarat dengan sejarah kebakaran hutan dan lahan. Hal ini tidak lepas dari kebijakan eksploitasi hutan luar Pulau Jawa oleh pemerintahan Orde Baru guna mendongkrak pendapatan negara dari kayu yang melimpah di wilayah ini. Seperti dilaporkan oleh Boer (2002), seluas 3,5 juta hektare hutan tropis di Kalimantan Timur rusak oleh kebakaran hutan tahun 1982/1983. Kejadian ini tidak hanya mengurangi luasan hutan tropis namun juga menurunkan kualitas layanan jasa ekosistem hutan itu sendiri. Dampak kebakaran jelas merusak lingkungan, menyebabkan hilangnya species flora dan fauna di hutan, mempengaruhi sosial ekonomi dan budaya masyarakat serta menurunkan derajat kesehatan masyarakat.

Kejadian kebakaran hutan tidak lepas dari 3 faktor pendukung, yakni adanya oksigen, panas, dan tersedianya bahan bakar. Pada saat terjadi fenomena kemarau panjang yang disebabkan anomali iklim seperti *El-Nino-Southern Oscilation* (ENSO) maka kumpulan serasah, berikut potongan dahan dan ranting dari sisa pembalakan hutan di lantai hutan menjadi sangat kering. Dengan api yang kecil sudah cukup mampu menyebabkan terjadinya kebakaran hutan yang parah dan masif. Selain faktor ENSO, pembalakan hutan diyakini berkontribusi besar pada frekuensi terjadinya kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Timur. Seiring dengan terus berlangsung aktivitas ekstraksi kayu dari hutan alam, kejadian kebakaran hutan dan lahan terjadi kembali di tahun 1987, 1991, 1994 dan 1997/1998 (Dennis, 1999).

Kebakaran hutan tahun 1997/1998 memiliki ekskalasi yang tidak kalah besar dari kebakaran 1982/1983. Dari bulan Januari hingga Mei 1998 terdeteksi

sebanyak 55.000 hotspots atau titik panas bersumber dari satelit NOAA *(National Oceanic and Atmospheric Administration)*. Dari pengolahan data *hotspots* tersebut diperkirakan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Timur (termasuk Kalimantan Utara saat itu) mencapai 3,75 juta hektare (Siegert dkk., 1999). Kejadian kebakaran kebakaran hutan dan lahan di Indonesia erat kaitannya dengan aktivitas manusia baik yang dilakukan individu maupun oleh korporasi (Purnomo, dkk. 2021). Oleh karenanya tidak mengherankan kebakaran kembali terjadi pada tahun 2015 yang dilaporkan oleh Chamorro, dkk (2017) menghanguskan 2,6 juta hektare hutan dan lahan di Indonesia. The Straitimes (2016) mengutip kajian peneliti yang menyebut bahwa kebakaran hutan di Indonesia tahun 2015 melepaskan karbon ke udara melebihi kejadian kebakaran di tahun 1997/1998. Emisi karbon yang dihasilkan dari kebakaran hutan ini bahkan dikatakan jauh lebih besar dari emisi yang diproduksi oleh negara-negara yang tergabung di Uni Eropa ditahun tersebut.

Dalam konteks politik internasional, asap pekat akibat kebakaran hutan dan lahan yang menyebar hingga ke negara tetangga Brunei Darussalam, Malaysia, dan Singapura menurunkan citra dan kredibiltas negara dalam mengelola sumber daya alamnya. Oleh karena itu, pasca kebakakaran besar tahun 2015 Pemerintah Indonesia secara serius dan sungguh-sungguh berupaya untuk mengantisipasi agar kejadian kebakaran hutan dan lahan tidak terulang kembali melalui perangkat kebijakan dan program pengendalian di lapangan yang melibatkan masyarakat termasuk jajaran kepolisian dan militer. Di tingkat tapak, pengendalian kebakaran hutan dan lahan dikawal oleh unit pengelola kawasan hutan, yakni Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) dan Pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan hutan (PBPH). Sementara di kawasan Areal Penggunaan Lain (APL), pencegahan dan pengendalian kebakaran bertumpu pada perusahaan pemegang izin perkebunan khususnya kelapa sawit.

Terlepas dari sejarah Provinsi Kalimantan Timur yang cukup — akrab dengan kejadian kebakaran hutan dan lahan, Pemerintah Indonesia telah memutuskan rencana pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) dari Jakarta ke Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) yang berbatasan dengan Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) pada akhir Agustus 2020 yang lalu. Rencana pemindahan IKN merupakan program strategis nasional yang telah dituangkan di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Konsep pembangunan IKN akan mengadopsi kota hijau yang ramah lingkungan dengan proporsi ruang terbuka dan bervegetasi yang lebih dominan. Namun, disisi lain pemindahan IKN diprediksi akan memicu gelombang migrasi

penduduk ke wilayah sekitar IKN khususnya di Kabupaten Penajam Paser Utara yang memiliki konsekuensi pada kebutuhan lahan yang akan meningkat baik untuk keperluan industri, komersial, permukiman, infrastruktur maupun fasilitas sosial dan umum lainnya.

Dengan melihat rekam jejak kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Kalimantan Timur yang cukup panjang dan merespon rencana pemindahan IKN ke Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara, maka menarik untuk melihat ke belakang kejadian kebakaran hutan dan lahan yang pernah melanda sekitar calon lokasi IKN dari data hotspots dalam kurun 20 tahun terakhir. Tinjauan ini menjadi relevan karena kehadiran IKN tidak lepas dari situasi penduduk saat ini dan yang akan datang, menurut Qadri (2001) dan Chamorro, dkk (2017) merupakan penyebab hampir semua kejadian kebakaran hutan dan lahan di Indonesia. Dengan memahami sejarah kebakaran hutan dan lahan di wilayah IKN dan sekitarnya diharapkan menjadi input dalam menyusun strategi mitigasi bencana kabakaran hutan dan lahan di wilayah IKN dan wilayah penyangga lain di sekitarnya.

Pembahasan

Asap yang ditimbulkan oleh kebakaran hutan dan lahan dapat menyebar ke wilayah sekitarnya hingga ratusan bahkan ribuan kilometer dari sumber kebakaran akibat terbawa angin (Hirschlag, 2020). Kabut asap ini bahkan dapat bertahan selama beberapa minggu sehingga menyebabkan berbagai persoalan kesehatan masyarakat dan lebih jauh mampu melumpuhkan aktivitas ekonomi dan pergerakan manusia. Merujuk pada fakta ini maka sebaran hotspots yang digunakan di dalam kajian ini difokuskan pada radius ± 200 km dari titik indikatif rencana pusat IKN, yakni pada koordinat 116°42'21.625" BT dan 0°54'45.126" LS. Dengan radius ini, maka area studi meliputi 3 provinsi yakni sebagian Provinsi Kalimantan Timur, sebagian Provinsi Kalimantan Tengah dan sebagian Provinsi Kalimantan Selatan. Tabel 1 berikut menampilkan wilayah administrasi yang termasuk di dalam radius ± 200 km dari titik indikatif rencana pusat IKN seperti terlihat pada Gambar 1.

Tabel 1. Luas wilayah administrasi pemerintahan yang berada pada radius ± 200 km dari titik indikatif rencana pusat IKN

Provinsi	Kabupaten/ Kota	Jumlah Kecamatan	Jumlah Desa/ kelurahan	Luas (ha)	Persentase
Kalimantan Timur	Balikpapan, Samarinda, Bontang	81	821	7.420.698	80%

	Kutai Kartanegara Kutai Timur Kutai Barat Mahakam Ulu Paser & PPU				
Kalimantan Tengah	Murung Raya Barito Utara Barito Selatan & Barito Timur	19	159	1.250.031	13%
Kalimantan Selatan	Balangan, Tabalong & Kota Baru	18	160	656.236	7%
	16	118	1.140	9.326.965	100%

Keterangan: Sumber batas wilayah administrasi diperoleh dari BPS versi April 2020

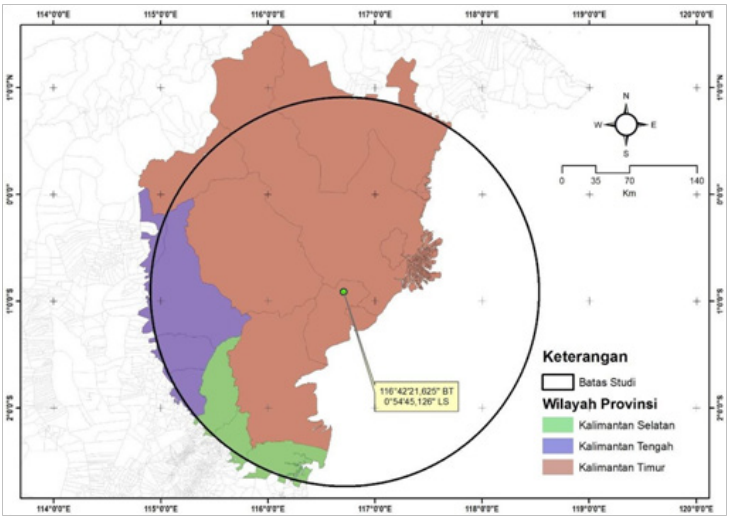

Gambar 1. Batas areal studi berupa lingkaran warna hitan dengan radius ± 200 km dari titik indikatif rencana pusat IKN sebagai acuan pengumpulan data hotspots MODIS tahun 2000 hingga 2020

Data *hotspots* diperoleh dari koleksi data satelit MODIS *(Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer)* 6.1 yang dikelola oleh NASA FIRMS *(Fire Information for Resources Management System)* dan dapat diunduh secara gratis. Sensor satelit MODIS mampu mendeteksi api aktif pada resolusi spasial 1 km persegi pada saat melintas di atas areal yang terbakar (Giglio, dkk. 2016). Dengan demikian setiap satu titik panas (hotspot) mewakili area seluas1 km2 atau 100 hektare permukaan bumi. Setiap titik panas juga memiliki informasi tingkat kepercayaan (confidence estimate) hingga maksimum 100%, yang memberi informasi peluang titik panas tersebut

benar-benar api kebakaran di lapangan. Dalam studi ini seluruh tingkat kepercayaan tetap dianalisis mempertimbangkan bahwa algoritma yang dikembangkan untuk menyaring kesalahan interpretasi hotspots telah dilakukan oleh tim peneliti NASA dengan lebih baik pada MODIS data koleksi 6.1 yang digunakan di dalam kajian ini (Giglio, dkk. 2016).

Sebanyak 21 seri data hotspots MODIS koleksi 6.1 digunakan dalam studi ini yakni periode 2000 hingga 2020. Total terdapat 62.707 hotspots dalam batas areal studi selama 21 tahun atau rata-rata terdapat 2.970 hotspots per tahun (Tabel 2). Jumlah *hotspots* terbanyak terjadi pada tahun 2015 yakni sebanyak 11.880 hotspots yang selanjutnya menurun signifikan pada tahun sesudahnya. *Hotspots* tertinggi tahun 2015 mengingatkan pada bencana asap dari kebakaran hutan dan lahan yang melanda Indonesia pada saat itu akibat kemarau yang melanda di bulan September dan Oktober sebagai efek dari ENSO (Huijnen, dkk., 2016).

Tabel 2. Rekapitulasi jumlah *hotsspots* pada area studi selama 21 tahun (2000-2020)

	Bulan												
Tahun	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jumlah
2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	10	14
2001	3	5	5	1	3	2	51	203	287	26	17	3	606
2002	20	15	1	10	18	6	116	1.098	2.077	2.080	183	101	5.705
2003	35	27	41	27	91	268	56	351	663	404	78	16	2.057
2004	43	17	32	50	46	152	99	1.914	1.203	2.971	344	12	6.883
2005	26	46	86	5	11	28	46	202	974	447	60	0	1.931
2006	11	48	17	26	17	13	165	816	2.278	1772	417	132	5.712
2007	19	42	24	51	34	8	15	156	696	693	95	35	1.868
2008	26	37	9	31	67	70	29	32	432	360	48	4	1.145
2009	9	8	26	18	53	79	187	594	3.229	590	202	31	5.025
2010	15	278	197	41	19	23	11	103	247	165	27	16	1.142
2011	6	19	6	27	25	77	156	704	676	204	101	4	2.005
2012	17	21	13	25	36	64	60	214	1.075	579	135	71	2.310
2013	38	20	13	20	29	35	32	83	817	641	86	16	1.830
2014	12	74	102	22	76	26	63	180	6	0	289	23	4.503

2015	15	17	82	67	46	26	120	1.195	3.429	5.942	686	255	11.880
2016	536	304	290	175	86	35	60	78	65	53	73	8	1.763
2017	2	6	7	11	17	12	16	57	117	141	9	17	412
2018	6	7	19	13	21	15	48	174	710	290	39	39	1.381
2019	28	99	57	24	20	15	34	256	1.867	569	232	56	3.257
2020	61	58	94	105	49	25	23	41	192	65	112	114	939
Rata-rata	**49**	**60**	**59**	**39**	**40**	**51**	**70**	**434**	**1.166**	**1.063**	**168**	**50**	**2.970**

Melihat data 21 tahun terakhir, nampak adanya siklus kebakaran hutan dan lahan yang berulang secara periodik (Gambar 2). Pengulangan ini berhubungan erat dengan kejadian ENSO yang berulang setiap 3,5 – 4,5 tahun. Periode ulangan ini didasarkan penelitian Wang, dkk (2019) yang mempelajari 33 kejadian ENSO selama 116 tahun (1901 – 2017). Penelitian ini juga menyimpulkan bahwa lokasi pemicu ENSO di Samudera Pasifik mengalami pergeseran dari sebelah timur ke sebelah barat Pasifik sebagai akibat dari perubahan iklim yang terjadi di bumi. Kondisi ini diyakini akan memicu semakin seringnya frekuensi kejadian ENSO di masa yang akan datang dengan situasi yang bisa lebih ekstrim dari yang terjadi saat ini.

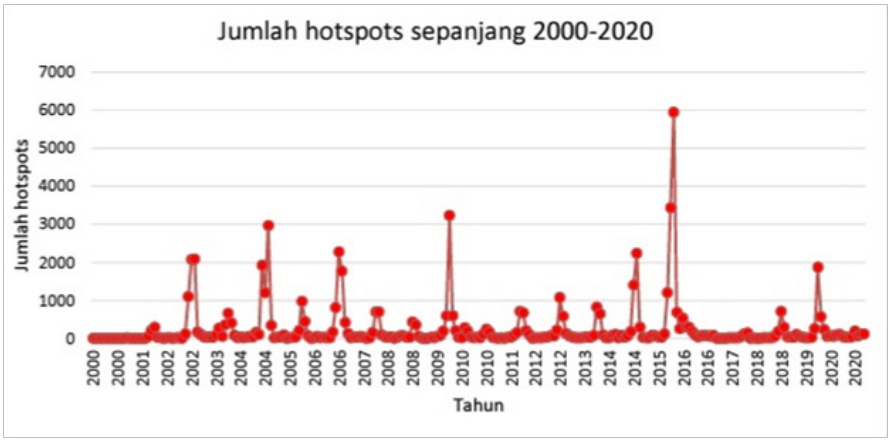

Gambar 2. Jumlah hotspots MODIS yang terdeteksi sepanjang tahun 2000 hingga 2020. Tampak pola peningkatan jumlah *hotspots* yang periodik dan terbanyak terdeteksi di tahun 2015.

Apabila seluruh data *hotspots* diratakan perbulannya maka lonjakan hotspots dalam jumlah yang signifikan diawali pada bulan Agustus dan meningkat dengan cepat di bulan September (Gambar 3). Jumlah *hotspots* di bulan Oktober tetap

terpantau tinggi namun mulai turun dibanding bulan September. Bulan November dan seterusnya, jumlah *hotpsots* turun signifikan seiring datangnya hujan. Khusus untuk akhir tahun 2015 dan awal tahun 2016, jumlah *hotspots* terpantau lebih tinggi dibanding bulan yang sama di tahun-tahun sebelumnya. *Hotspots* di bulan yang tidak biasa ini terkonsentrasi di Kabupaten Kutai Kartanegara hingga perbatasan Kutai Timur.

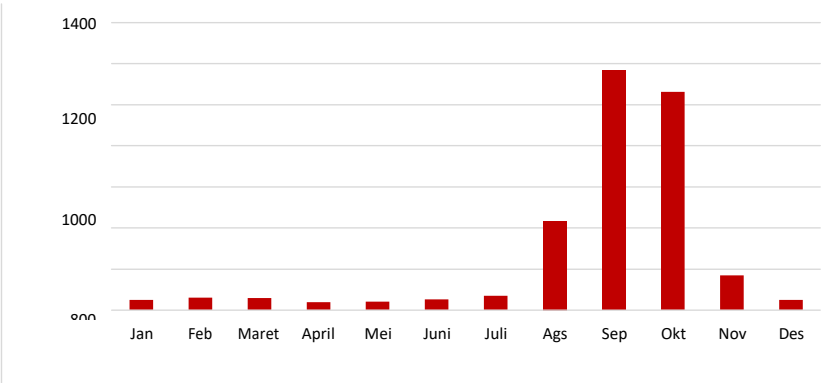

Gambar 3. Jumlah rata-rata *hotspots* per bulan yang dihitung selama 21 tahun. Peningkatan *hotspots* diawali bulan Agustus dan melonjak lebih dari 2 kali lipat di bulan September.

Kajian ini selanjutnya menganalisis kerapatan titik *(point density analysis)* terhadap data sebaran 62.707 *hotspots* untuk mengidentifikasi lokasi-lokasi yang kerap terdeteksi adanya *hotspots*. Informasi ini menjadi indikasi terjadinya kebakaran yang berulang-ulang di tempat yang sama. Analisis kerapatan titik mengubah sebaran *hotspots* menjadi piksel-piksel berukuran 1 hektar dengan frekuensi *hotspots* di setiap piksel tersebut. Hasil analisis ini adalah *continuous surface* layer kerapatan *hotspots* dalam batas areal studi sebagaimana tersaji pada Gambar 4 berikut.

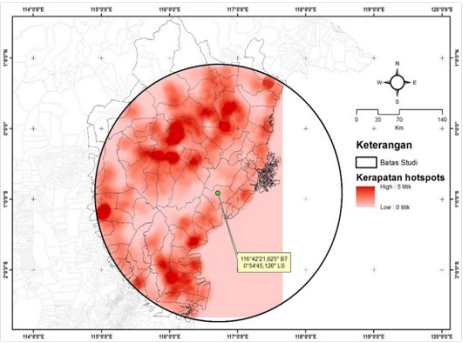

Gambar 4. Frekuensi kemunculan *hotspots* berdasarkan wilayah kecamatan dalam areal studi. Warna paling merah menunjukkan lokasi dengan *hotspots* terdeteksi sebanyak 5 kali di lokasi yang sama.

Dari gambar di atas, wilayah dengan radius ± 200 km dari indikasi

pusat IKN ternyata memiliki sejarah terkepung oleh kebakaran hutan dan lahan yang diindikasikan dari *hotspots* MODIS tahun 2000 hingga 2020. Dengan jarak lebih kurang 100 km ke arah barat laut dari pusat IKN nampak lokasi-lokasi yang diindikasikan sering terbakar pada bulan-bulan kering September dan Oktober. Lokasi indikatif ini berada antara lain di Kecamatan Muara Pahu, Kenohan, Muara Kaman, Melak dan Muara Muntai. Sementara di selatan, lokasi dengan frekuensi terbakar yang tinggi terdeteksi Kecamatan Batu Engau, Pasir Balengkong, Long Ikis dan Batu Sopang. Di Kalimantan Tengah, Kecamatan Teweh Baru dan Gunung Timang terdeteksi memiliki frekuensi hotspots tinggi dan hanya berjarak ±188 km dari pusat IKN.

Apabila hasil analisis kerapatan data *hotspots* 2000 – 2020 di atas dibandingkan dengan peta kerusakan vegetasi akibat kebakaran tahun 1997/1998 (Gambar 5) yang dibuat oleh *Proyek GTZ IFFM/SFMP* di Kalimantan Timur maka terdapat konsistensi yang jelas (Hoffmann, dkk., 2000). Kecamatan-kecamatan yang disebutkan di atas khususnya yang berada di Kabupaten Kutai Barat dan Kutai Kartanegara mengalami kerusakan vegetasi hingga lebih dari 80%. Dengan membandingkan kedua hasil analisis ini maka wilayah-wilayah kecamatan ini adalah wilayah laten bahaya kebakaran hutan dan lahan yang perlu diwaspadai khususnya memasuki musim kemarau di bulan Agustus setiap tahunnya.

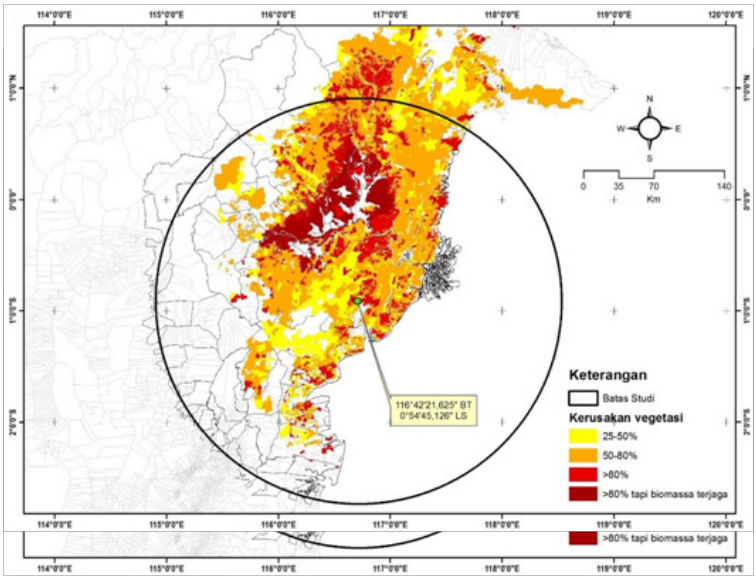

Gambar 5. Peta tingkat kerusakan vegetasi akibat kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Kalimantan Timur tahun 1997/1998 yang dianalisis dari citra ERS-2 SAR oleh Proyek GTZ IFFM/SFMP.

Memperhatikan hasil analisis studi ini, maka rencana pembangunan IKN perlu mempertimbangkan secara serius kejadian kebakaran hutan dan lahan yang terjadi pada tahun- tahun sebelumnya. Perlu upaya pengendalian dan pencegahan kebakaran hutan dan lahan yang integratif dengan melibatkan banyak daerah otonom di sekitar kawasan IKN. Pemerintah pusat perlu mengawal proses ini dengan baik agar pemindahan IKN dapat menjadi pemicu perbaikan lingkungan di Provinsi Kalimantan Timur khususnya dalam hal pencegahan kebakaran hutan dan lahan. Tentu tidak elok manakala IKN yang baru dibangun dan dikembangkan justru menjadi daerah yang pertama terdampak kebakaran hutan dan lahan. Kredibilitas negara dan bangsa Indonesia tentu akan dipertanyakan manakala kebakaran hutan dan lahan tetap terjadi dengan jarak tidak lebih dari perjalanan Jakarta menuju Bandung.

Kesimpulan

Ibu Kota Negara (IKN) adalah simbol dan lambang negara yang merepresentasikan karakter bangsa dan akan menjadi kebanggaan seluruh rakyat Indonesia. Untuk itu pemindahan IKN dari Jakarta ke Kalimantan Timur perlu mempertimbangkan berbagai aspek termasuk kejadian kebakaran hutan dan lahan yang masih menghantui wilayah ini khususnya pada musim kemarau. Hasil studi ini berhasil memotret wilayah-wilayah yang berpotensi menjadi episentrum kebakaran hutan dan lahan di sekitar titik pusat pemerintahan IKN yang baru pada radius ±200 km. Wilayah di bagian tengah Kabupaten Kutai Kartanegara, bagian selatan Kabupaten Kutai Barat dan Kutai Timur perlu diwaspadai karena terindikasi memiliki frekuensi terbakar yang berulang selain wilayah Kabupaten Paser bagian selatan. Informasi ini diharapkan dapat membantu pemerintah untuk menyusun kebijakan yang integratif untuk mencegah dan mengendalikan kejadian kebakaran hutan dan lahan di sekitar wilayah IKN di masa-masa yang akan datang.

Daftar Pustaka

Boer, C. (2002). Forest and Fire Suppression in East Kalimantan, Indonesia. Communities in Flames: Proceedings of an International Conference on Community Involvement in Fire Management. Eds. Moore, P., Ganz, D., Tan, L.C., Enters, T., and Durst, P.B. Food and Agriculture Organization of the United Nations Regional Office for Asia and the Pacific. Bangkok, Thailand. Tersedia di sini

Chamorro, A., Minnemeyer, S., Sargent, S. (2017). Exploring Indonesia's Long and Complicated History of Forest Fires. Insights World Resources Institute. Tersedia di sini

Dennis, R. (1999). A Review of Fire Projects in Indonesia (1982-1998). Center for International Forestry Research (CIFOR). Bogor, Indonesia. Tersedia di sini

Giglio, L., Schroeder, W., Justice, C.O. (2016). The collection 6 MODIS active fire detection algorithm and fire products. Remote Sensing of Environment, 178, 31-41. DOI : 10.1016/j.rse.2016.02.054

Hirschlag, A. (2020). Smoke from burning forests and peat can linger in the atmosphere for weeks, travelling thousands of miles and harming the health of populations living far away. Future BBC. Tersedia di sini

Hoffmann, A.A., Hinrichs, A., Siegert, F. (2000). Fire Damages in East Kalimantan in 1997/98: Relations to Land Use and Proposals for Further Action. International Forest Fire News (IFFN), 23, 31-35. Tersedia di sini

Huijnen, V., Wooster, M.J., Kaiser, J.W., Gaveau, D.L.A., Flemming, J., Parrington, M., Inness, A., Murdiyarso, D., Main, B., van Weele, M. (2016). Fire carbon emissions over maritime southeast Asia in 2015 largest since 1997. Scientific Reports, 6. DOI : 10.1038/srep26886 (2016)

Purnomo, E.P., Az Zahra, A., Malawani, A.D., Anand, P. (2021). The Kalimantan Forest Fires: An Actor Analysis Based on Supreme Court Documents in Indonesia. Sustainability, 13(4), 2342. DOI : 10.3390/su13042342

Qadri, S.T. (2001). Fire, Smoke and Haze. The ASEAN Response Strategy. Association of

Southeast Asian Nations - Asian Development Bank. Manila, Phillipines. Tersedia di sini

Siegert, F., Rucker, G., Hoffmann, A. (1999). Evaluation of the 1998 Forest Fires in East-Kalimantan (Indonesia) Using NOAA-AVHRR hotspot Data and Multitemporal ERS-2 SAR images. Conference Paper IEEE 1999 International Geoscience and Remote Sensing Symposium. DOI: 10.1109/IGARSS.1999.773441.

The Straittimes. (2016). Indonesia Forest Fires in 2015 Released Most Carbon Since 1997: Scientists. Tersedia di sini.

Wang, B., Luo, X., Yang, Y., Sun, W., Cane, M.A., Cai, W., Yeh, S., Liu, J. (2019). Historical change of El Niño properties sheds light on future changes of extreme El Niño. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America (PNAS), 116(45). DOI : 10.1073/pnas.1911130116

Prospek Akselerasi Eliminasi Malaria di Kawasan Ibu Kota Baru

Rahmat Bakhtiar & Krispinus Duma
IKM/KK Fakultas Kedokteran, Universitas Mulawarman

Pendahuluan

Meskipun terdapat penurunan yang signifikan jumlah kasus dan kematian akibat malaria dalam dekade terakhir, secara global malaria masih menjadi masalah kesehatan masyarakat. Tahun 2020, diperkirakan 229 juta orang terinfeksi malaria di 87 negara. Malaria masih mengancam penduduk terutama bayi, balita, dan ibu hamil karena nyamuk dengan plasmodium tersebar luas di belahan dunia khususnya daerah tropis dan sub-tropis seperti Asia khususnya Asia Tenggara, Amerika Selatan dan Sub-Sahara Afrika. Faktor lingkungan mempengaruhi intensitas penularan, musim, dan distribusi geografis malaria, dan bersama-sama dengan vektor, host, dan plasmodium membentuk sistem malaria.

Situasi kasus malaria di Indonesia juga mengalami penurunan sejak dekade terakhir. Sebagai negara berisiko malaria masih terdapat 23 Kabupaten/Kota endemis tinggi, 21 daerah endemis sedang, dan 152 daerah endemis rendah. Kementerian Kesehatan (Kemenkes) tahun 2020 melaporkan sebanyak 300 kabupaten/kota atau 208,1 juta (77,7%) penduduk Indonesia tinggal di daerah bebas malaria sebagian besar di provinsi DKI Jakarta, Jawa Timur, dan Bali. Meskipun proporsi penduduk Indonesia tinggal didaerah bebas malaria semakin tinggi tetapi arus mobilisasi masyarakat masuk dan keluar dari daerah endemis tinggi cukup besar sehingga potensi penyebaran malaria masih tinggi.

Sebagai wilayah endemis malaria sejak dahulu, Provinsi Kalimantan Timur telah melaksanakan program eliminasi malaria secara nasional. Kemenkes menargetkan eliminasi malaria untuk kawasan Kalimantan dan Maluku Utara pada tahun 2027. Data tahun 2020 menggambarkan, jumlah daerah dengan status endemisitas malaria tinggi dan sedang yang berubah menjadi rendah dan bebas meningkat artinya program peta jalan eliminasi berjalan dengan baik. Meskipun demikian masih terdapat tiga Kabupaten dengan tingkat endemisitas sedang dan tinggi yaitu Kabupaten Penajam Paser Utara, Kabupaten Paser dan

Kabupaten Kutai Barat dengan jumlah kasus sebanyak 2356 dan kematian sebanyak 5 orang. Sejalan dengan Roosihermiatie, implementasi kebijakan nasional eliminasi malaria di daerah endemis malaria bervariasi bahkan ada daerah yang tidak memperlihatkan kemajuan disebabkan lemahnya komitmen dan pembiayaan. Status endemis tinggi malaria di Kabupaten Penajam Paser Utara yang berbatasan langsung dengan lokasi ibu kota negara menjadi salah satu masalah yang perlu diselesaikan secara komprehensif. Tulisan ini bertujuan menganalisa strategi implementasi program prioritas dalam percepatan eliminasi malaria di desa endemis tinggi disekitar ibu kota negara baru.

Pembahasan

Mengacu konsensus global, eliminasi malaria menjadi prioritas nasional dengan mengacu pada sasaran peta jalan eliminasi malaria nasiona. Sampai tahun 2020, hanya terdapat tiga daerah bebas malaria di Kalimantan Timur, yaitu Kota Bontang, Balikpapan dan Samarinda. Empat Kabupaten dengan status endemis rendah yaitu Kabupaten Kutai Timur, Berau, Kutai Kartanegara dan Mahakam Ulu dan dua daerah dengan status endemis sedang yaitu kabupaten Kutai Barat dan Pasir serta satu Kabupaten dengan endemis tinggi yaitu Penajam Paser Utara.

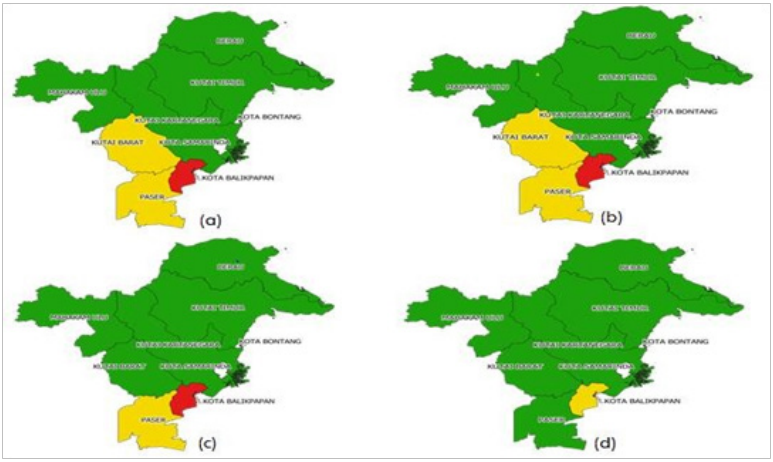

Gambar 1. Situasi malaria di Kalimantan Timur (a) tahun 2018, (b) tahun 2019, (c) tahun 2020 dan (d) September 2021

Status endemitas tinggi malaria di Kabupaten Penajam Paser Utara sudah terjadi sejak sebelum tahun 2000. Status endemisitas ini sulit untuk diturunkan karena terdapat 4-5 desa fokus malaria seperti terlihat pada gambar 2. Secara historis

desa desa endemis ini berbatasan dengan kawasan Bukit Bengkirai dan perusahaan perkayuan. Data tahun 2018-2020 menunjukkan seluruh desa yang berbatasan dengan lokasi ibukota negara adalah daerah risiko malaria sedang dan tinggi dengan Annual Paracite Index (API) berkisar antara 5,39 – 34,788.

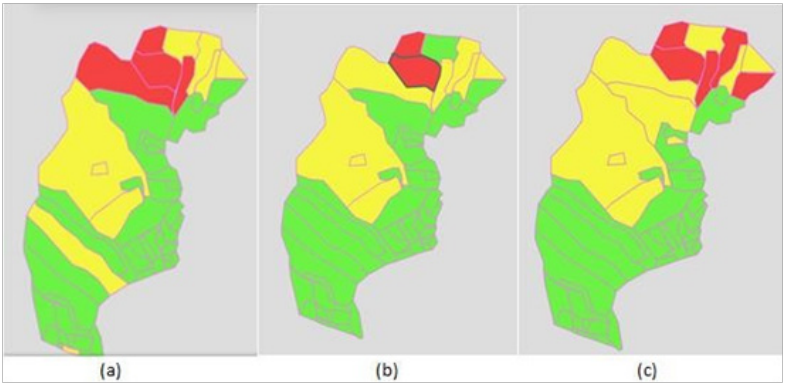

Gambar 2 Distribusi kejadian malaria tingkat desa di Kabupaten Penajam Paser Utara (a) tahun 2018, (b) tahun 2019 dan (c) tahun 2020.

Pada tahun 2018 terdapat 4 desa endemis tinggi malaria yaitu desa Bukit Raya, Sepaku, Bumi Harapan dan Sukaraja (gambar 2). Hanya desa Bumi Harapan yang tingkat endemisitasnya berhasil diturunkan menjadi endemisitas sedang selama 2 tahun terakhir. Sedangkan pada desa dengan endemisitas tinggi cenderung tidak berubah. Bahkan jumlah desa dengan endemisitas tinggi bertambah, yaitu desa Semoi 2 dan desa Tengin Baru. Hal yang menarik juga terlihat di desa Sukaraja yang menurun endemisitasnya pada tahun 2019 kemudian meningkat kembali pada tahun 2020. Sebagian besar desa dengan endemisitas sedang seperti yang ditunjukkan pada gambar 2 ternyata tidak berubah dan cenderung meningkat endemisitasnya. Intervensi spesifik desa endemis tinggi perlu dilakukan dan dievaluasi sehingga masalah utama dapat diidentifikasi.

Sebagian besar kasus malaria adalah pekerja perambah hutan dan karyawan perkebunan sawit (tabel 1). Analisa kasus menunjukkan kemungkinan para pekerja terinfeksi malaria dihutan tempat bekerja dan mencari pengobatan di Puskesmas terdekat. Orang yang tempat bekerjanya di hutan mempunyai risiko untuk tertular penyakit malaria karena hutan merupakan tempat hidup nyamuk spesies Anopheles dan berkembangbiak dengan kepadatan yang tinggi, sedangkan rumah merupakan tempat istirahat. Risiko penularan malaria tergantung seberapa jauh tempat perindukan nyamuk ke desa atau tempat tinggal pekerja dihutan. Penelitian Kusuma di

Pangandaran menemukan jarak terbang nyamuk adalah 1,6 - 2 km dari tempat perindukannya. Keberadaan vegetasi yang rimbun akan mengurangi sinar matahari masuk atau menembus permukaan tanah, sehingga lingkungan sekitarnya akan menjadi teduh dan lembab. Kondisi ini merupakan tempat yang baik untuk untuk beristirahat bagi nyamuk dan juga tempat perindukan nyamuk yang di bawah semak tersebut terdapat air yang tergenang. Faktor determinan utama malaria adalah tempat perindukan *(breeding place)*, pengunaan kelambu, kebiasaan keluar rumah malam hari. Masrizal di Padang mendapatkan faktor lingkungan dan riwayat kunjungan ke daerah endemis mempengaruhi kejadian malaria.

Data klasifikasi jenis plasmodium di Kalimantan Timur tahun 2018-2020 menunjukkan penyebab malaria yang tertinggi adalah plasmodium vivax (44,5%), plasmodium palcifarum (40,56%) dan plamodium mix (14,5%) dan plasmodium malaria (0,42%). Sedangkan plasmodium ovale hanya dilaporkan pada tahun 20186. WHO (2018) mengidentifikasi di kawasan Asia tenggara sekitar 53% kasus malaria disebabkan oleh Plasmodium vivax. Plasmodium falciparum merupakan spesies plasmodium yang paling umum di Indonesia. Namun data sebaran parasit perwilayah belum dilakukan secara rutin dan terdokumentasi dengan baik, sehingga tidak dapat diketahui jenis parasit yang dominan per suatu wilayah/desa. Sesuai karakteristik geografis wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara, vektor malaria yang berkembang biak di perbukitan atau hutan adalah An.balabacensis, An.bancrofti, An.punculatus, An.Umbrosus dan waktu aktivitas menggigit nyamuk anopheles adalah jam 17.00-18.00, sebelum jam 24 (20.00-23.00), setelah jam 24 (00.00-4.00). Nyamuk Anopheles memiliki DAFTAR PUSTAKA perkembangbiakan yang berbeda, dan kondisi alam seperti seperti suhu dan kualitas air, karakteristik tanah, dan semak.

Perilaku vektor malaria sangat penting diketahui oleh pengambil keputusan sebagai dasar pertimbangan menentukan intervensi dalam pengendalian vektor yang lebih efektif. Tingginya kepadatan vektor nyamuk anopheles dan tidak terlindunginya pekerja membuat proses penularan malaria diantara pekerja semakin tinggi. Kemungkinan lain disebabkan karena tidak dilakukannya skrining sebelum masuk hutan sehingga diantara rombongan pekerja ada yang menderita malaria inaktif *(carrier)*. Sejalan dengan penelitian Hakim di Pangandaran Jawa Barat mendapatkan sumber penularan malaria adalah penderita malaria inaktif dan terjadi diluar desa. Aktivitas pekerja keluar masuk desa terdekat baik untuk keperluan pembelian bahan makanan atau mencari pengobatan berpotensi meningkat-kan risiko penularan setempat (indegenous). Fenomena sumber penularan yang berasal dari *index case* dengan malaria inaktif pada pekerja logging di Sabah Malaysia.

Tabel 1. Karakteristik Pekerjaan Penderita Malaria di Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2020

Jenis Pekerjaan	**Jumlah**	**%**
Perambah Hutan (illegal logging)	1.237	85,01
Karyawan Perusahaan Perkebunan (tetap + subkon)	116	7,97
Mayarakat Pekebun	29	1,94
Masyarakat Petani	44	3,14
Lain lain	29	1,94
Total	**1455**	**100**

Sumber: Dinas Kesehatan Penajam Pasir Utara tahun 2020

Malaria adalah penyakit infeksi akut maupun kronik yang disebakan oleh infeksi Plasmodium yang menyerang eritrosit dan ditandai dengan ditemukannya bentuk aseksual dalam darah, dengan gejala demam, menggigil, anemia, dan pembesaran limpa. Gejala yang berat yang berpotensi menimbulkan kematian disebabkan plasmodium palcifarum yang disebut malaria cerebral. Sebagian besar masyarakat yang tinggal didaerah endemis menganggap bahwa malaria adalah penyakit yang biasa sehingga menyebabkan kurang perhatian dari masyarakat. Hal ini terlihat dari tingginya penggunaan obat malaria yang tidak standar. Pengobatan standar malaria menggunakan Artemisinin Combination Therapy (ACT) bertujuan untuk membunuh semua stadium parasit yang ada di dalam tubuh, pengobatan kombinasi ini diperlukan untuk mencegah resistensi obat malaria. Hasil review data pengobatan malaria sejak tahun 2018 memperlihatkan pengobatan standar malaria cenderung meningkat. Meskipun demikian pada tahun 2021 masih terdapat 13,37% penderita malaria yang belum mendapat pengobatan standar. Data Riskesdas 2013 menunjukkan sebagian besar obat anti malaria didapatkan dari apotek dan pelayanan kesehatan formal. Namun, tidak sedikit penderita yang mendapatkan obat antimalaria dari toko obat/warung/penjual jamu seperti primaquin, kloroquin, dan sulfadoxin-pyrimethamin. Penelitian Lubis di Sumatera Utara mengindikasikan kemungkinan sudah terjadi resistensi terhadap ACT20.

Eliminasi malaria merupakan upaya untuk menghentikan penularan malaria setempat dalam satu wilayah geografi tertentu. Tercapainya eliminasi bukan berarti tidak ada kasus malaria impor atau sudah tidak ada vektor di wilayah tersebut,

sehingga tetap dibutuhkan kegiatan kewaspadaan untuk mencegah penularan kembali. Kemenkes menetapkan standar eliminasi adalah tidak ada penularan setempat selama tiga tahun berturut-turut, positivity rate < 5%, dan API < 1 per 1000 penduduk. Mencegah munculnya penularan malaria kembali menjadi tantangan bagi Kabupaten/Kota yang telah bebas malaria. Pertumbuhan penduduk yang cepat, migrasi, sanitasi yang buruk, serta daerah yang terlalu padat membantu memudahkan penyebaran penyakit malaria. Perubahan lingkungan yang menguntungkan perindukan nyamuk seperti pembangunan proyek konstruksi yang tidak berwawasan lingkungan, galian pasir, reaklamasi galian yang tidak dilakukan dengan baik, tambak ikan yang tidak dimanfaatkan serta perubahan iklim setempat. Pembukaan lahan-lahan baru serta urbanisasi meningkatkan peluang kontak antara nyamuk dengan manusia yang bermukim didaerah tersebut dan berpotensi terjadi Kejadian Luar Biasa (KLB). Timbulnya KLB dipicu oleh perubahan lingkungan yang meningkatkan tempat perindukan nyamuk.

Pemberian Kelambu Massal Fokus dengan output jumlah rumah tangga yang memiliki setidaknya satu kelambu untuk melindungi penghuninya dari gigitan nyamuk. Penggunaan kelambu berinsektisida sangat efektif dalam mencegah terinfeksi malaria. Jika penggunaan kelambu massal tidak efektif dapat dilakukan *Indoor Residual Spraying* (IRS). Juru Malaria Desa berperan dalam mengidentifikasi dan menemukan kasus malaria terutama didaerah endemis sedang dan tinggi. Puskesmas yang berlokasi di daerah endemis rendah karena kasus malaria sedikit dapat melakukan penguatan diagnosis dini, melakukan skrining malaria pada semua ibu hamil ketika melakukan pemeriksaan kehamilan dan menerapkan pendekatan Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS) pada semua Balita sakit.

Kesimpulan

Strategi akselerasi pencapaian eliminasi malaria dilakukan dengan menemukan kasus aktif/inaktif secara dini dan mengobatinya dengan pengobatan standar. Program eliminasi berkontribusi membangun kapasitas lokal dan berdampak pada jaminan meningkatnya kesehatan masyarakat. Intervensi program prioritas dan penguatan komitmen dari seluruh stakeholder diperlukan agar percepatan eliminasi malaria sesuai target eliminasi nasional.

Daftar Pustaka

WHO. World malaria report 2020. (2020).

Mokuolu, O. A., Adegboye, O. D. & Mokuolu, O. A. The Impact of Environmental Factors on Malaria Prevalence in A Peri-Urban Community. Int. J. Public Heal. Sci. 3, 173–178 (2014).

Castro, M. C. Malaria transmission and prospects for malaria eradication: The role of the environment. Cold Spring Harb. Perspect. Med. 7, 1–12 (2017).

Kemenkes RI. Laporan Peta Jalan Eliminasi Malaria di Indonesia tahun 2030. (2020).

Sitohang, V. et al. Malaria elimination in Indonesia: halfway there. Lancet Glob. Heal. 6, e604–e606 (2018).

Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur. Laporan Program Malaria Di Kalimantan Timur Tahun 2021.

Roosihermiatie, B., Pratiwi, N. L., Rukmini, R. & P, W. J. Analysis of Implementation The Policy on Malaria Elimination in Indonesia. Bul. Penelit. Sist. Kesehat. 18, 277–284 (2016).

Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara. Laporan Program Malaria di Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2020. (2020).

Ndoen, E., Wild, C., Dale, P., Sipe, N. & Dale, M. Relationships between anopheline mosquitoes and topography in West Timor and Java, Indonesia. Malar. J. 9, 1–9 (2010).

Kusuma, U. & Widyanto, A. Deskripsi Bionomik Nyamuk Anopheles Sp di Wilayah Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran Provinsi Jawa Barat Tahun 2016. Bul. Keslingmas 35, 383–388 (2016).

Hasyim, H., Camelia, A. & Alam, N. F. Determinan Kejadian Malaria di Wilayah Endemis Provinsi Sumatera Selatan. Kesehat. Masy. Nas. 8, 291–294 (2014).

Lewinsca, M. Y., Raharjo, M. & Nurjazuli, N. Faktor Risiko yang Mempengaruhi Kejadian Malaria Di Indonesia : Review Literatur 2016-2020. J. Kesehat. Lingkung. 11, 16–28 (2021).

Masrizal, M., Putri, T. S. & Hasni, I. Environmental and Behavioral Conditions That Affect Malaria Events in Padang City. J. Berk. Epidemiol. 8, 164 (2020).

WHO. Malaria. https://www.who.int/ith/diseases/malaria/en/ (2019).

Elyazar, I. R. F., Hay, S. I. & Baird, J. K. Malaria Distribution, Prevalence, Drug Resistance and Control in Indonesia. Adv Parasitol 74, 41–175 (2011).

Kementerian Kesehatan. Epidemiologi Malaria di Indonesia. Bul. Jendela Data Dan Inf. Kesehat. 1–40 (2011).

Lukman Hakim. Faktor risiko penularan malaria di desa pamotan Kabupaten pangandaran.2013 5, 45–54 (2013).

Naserrudin, N. A. et al. High incidence of asymptomatic cases during an outbreak of plasmodium malariae in a remote village of Malaysian borneo. PLoS Negl. Trop. Dis. 15, 1–10 (2021).

Litbangkes. Riskesdas 2013. (2014).

Lubis, I. N. D. et al. Recurrence of plasmodium malariae and p. falciparum following treatment of uncomplicated malaria in north sumatera with dihydroartemisinin-piperaquine or artemether-lumefantrine. Open Forum Infect. Dis. 7, 1–8 (2020).

Laihad, F. J. Pengendalian Malaria Dalam Era Otonomi dan Desentralisasi Menuju Eliminasi Malaria tahun 2030 di Indonesia. Bul. Jendela Data dan Inf. Kesehat. 1, 17–22 (2011).

Sugiarto, S., Hadi, U. K., Soviana, S. & Hakim, L. Efektivitas Kelambu Berinsektisida Terhadap Nyamuk Anopheles sundaicus (Diptera: Culicidae) dan Penggunaannya di Desa Sungai Nyamuk, Kalimantan Utara. J. Spirakel 10, 1–11 (2018).

Ikawati, B., Yunianto, B. & D, R. A. P. Efektifitas Pemakaian Kelambu Berinsektisida di Desa Endemis Malaria di Kabupaten Wonosobo. BALABA 6, 1–6 (2010).

Yahya. Penggunaan Kelambu Berinsektisida Permethrin Di Desa Seleman Kecamatan Tanjung Agung Kabupaten Muara Enim Sumatera Selatan. J. Pembang. Mns. 5, (2011).

Kementerian Kesehatan. Pedoman Penggunaan Insektisida (Pestisida) Dalam Pengendalian Vektor. (Kementerian Kesehatan, 2012).

Lenakoly, T. Y. Uji Resisitensi Vektor Malaria Terhadap Insektisida (Deltametrin 0,05%) di Desa Piru Kabupaten Seram Bagian Barat Provinsi Maluku. SKRIPSI FKM UNDIP (2020).

IKN di Kalimantan Timur: Analisis Isu Pertahanan-Keamanan dan Geopolitik dalam Dimensi Hubungan Internasional

Rendy Wirawan
Prodi Hubungan Internasional, Fisip, Universitas Mulawarman

Pendahuluan

Jakarta sebagai ibu kota negara Indonesia sejak 76 tahun yang lalu diyakini telah mengamban cukup banyak permasalahan, mulai dari permasalahan masif mengenai kemacetan, polusi dan banjir, hingga masalah sosio-kultural seperti premanisme dan kemiskinan yang hadir hampir merata di seluruh penjuru kota Jakarta. Dengan jumlah penduduk mencapai 14 juta jiwa dalam luasan sekitar 660 km persegi, tentu Jakarta menjadi kota yang tergolong sangat padat, menjadi yang terpadat ke-17 di dunia (Kolb, 2017). Menjadikan permasalahan seperti kemacetan tentu bukan menjadi barang yang baru di Jakarta. Merujuk pada riset Tomtom, Jakarta menempati urutan ke-7 kota termacet di dunia pada tahun 2018 (Prireza, 2020). Kemacetan ini pun mengakibatkan kerugian yang menurut Bank Dunia mencapai 65 triliun tiap tahunnya (Citradi, 2019). Selain macet, banjir menjadi tantangan tersendiri bagi ibu kota yang memiliki muka tanah dibawah muka air laut ini. Muka tanah Jakarta diperhitungkan turun rata-rata 1-15 cm per tahunnya dengan estimasi 95% wilayah Jakarta utara akan tenggelap pada tahun 2050, menjadikannya "the fastest sinking city in the world" menurut kantor berita BBC (Lin & Hidayat, 2018).

Permasalahan yang terus menumpuk di Jakarta akhirnya mampu meyakinkan pemerintahan Presiden Joko Widodo untuk mengambil Langkah yang cukup ekstrim, yaitu memindahkan ibu kota negara ke wilayah baru. Gagasan ini bukanlah kali pertama dicetuskan, Presiden Soekarno dulu sempat menggulingkan wacana untuk memindahkan ibu kota negara ke Palangka Raya, yang beliau yakini tepat berada di tengah Indonesia. Rencana lainnya pernah disampaikan Presiden Soeharto pada pemerintahannya untuk memindahkan ibu kota ke Jonggol Jawa Barat. Serupa dengan Presiden Soeharto, Presiden Yudhoyono pun sempat mewacanakan pemindahan ibu kota ke Jakarta bagian timur, atau di sekitar Jawa Barat. Namun, hanya pada era Presiden Joko Widodo ibu kota benar-benar dapat direalisasikan

pemindahannya. Presiden Joko Widodo kemudian pada tanggal 17 Agustus 2019 mengumumkan pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur, tepatnya sebagian wilayah yang saling berpotongan, yaitu Kecamatan Sepaku yang terletak antara Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara.

Sejak dipilihnya Kalimantan Timur tahun 2019 lalu sebagai calon ibu kota negara Indonesia yang baru, pelbagai analisa mengenai dampak lingkungan, sosio-kultural, ketahanan negara hingga aspek ekonomi makro sering kali diulas dalam berbagai media. Aspek yang acap kali luput dari PEMBAHASAN adalah aspek yang meliputi isu-isu pertahanan-keamanan yang terkait dengan kajian hubungan internasional serta isu politik luar negeri Indonesia dalam kerangka arsitektur geopolitik kawasan. Hal ini menjadi penting bagi Indonesia mengingat cita-cita luhur pendiri bangsa yang memimpikan Indonesia menjadi bangsa yang besar di dunia. Lebih spesifik dari nilai normatif tersebut, ibu kota negara baru haruslah menjadi rumah yang aman bagi ratusan juta masyarakat Indonesia. Bukan semata-mata aman bagi masyarakat yang tinggal di lingkungan IKN, namun menjadi simbol kekuatan bangsa yang mampu mempertahankan kedaulatan NKRI diseluruh penjuru tanah air.

Analisa dalam tulisan ini akan terbagi dalam dua tema besar, pertahanan-keamanan dan geopolitik kawasan. Pada setiap tema akan mengupas isu-isu utama yang berkaitan hanya dipermukaannya saja. Pada kenyataannya, akan ada ratusan isu dalam kajian hubungan internasional yang berkaitan baik langsung ataupun tidak dengan dua tema tersebut, maka PEMBAHASAN tulisan ini akan menjadi meluas dan tidak terarah bila kita mencoba mengupas keseluruhan isu tersebut. Di samping itu, masih sangat terbatas literatur yang berkaitan denga wilayah IKN baru ini, baik secara umum dan khusus seperti dalam konteks keamanan-pertahanan.

Terorisme sebagai Ancaman Laten di IKN baru

Dalam topik pertahanan dan keamanan seperti yang sudah diulas sebelumnya tentu memiliki banyak isu. Diataranya yang akan dibahas dalam bab ini adalah isu terkait teorisme dan penyelundupan narkoba. Dua isu tersebut akan sangat mempengaruhi arsitektur pertahanan dan keamanan di IKN baru terutama saat kita bandingkan dengan Jakarta sebagai ibu kota yang sudah memiliki beragam fasilitas pertahanan dan keamanan pendukung.

Pemilihan IKN di Kalimantan Timur tentu memiliki tantangan tersendiri bagi pengambil kebijakan untuk dipertimbangkan, terutama dalam konteks pertahanan dan keamanan. Tantangan yang dihadapi IKN baru berbeda dengan apa yang dihadapi di DKI Jakarta. Sebagai kota metropolis tentu DKI Jakarta

menyimpan sejuta masalah terkait pertahanan dan keamanan, termasuk kejahatan terorisme sebagai salah satu ancaman nyata isu keamanan non-tradisional. Tercatat setidaknya telah terjadi 11 serangan teroris di Jakarta sejak tahun 2000 hingga 2021. Angka ini tentu sangat fantastis untuk sebuah ibu kota negara dimana pasukan keamanan mayoritas dikerahkan. Tidak hanya banyak dari segi jumlah serangan, aksi terorisme di Jakarta pun telah membuat banyak korban jiwa berjatuhan. Dalam hal kapasitas aksipun kelompok terrorist tersebut tergolong berhasil. Merujuk pada tulisan Bruce Hoffman (2006) yang mengindikasikan bahwa tujuan aksi terorisme adalah menyebar ketakutat di ruang publik, maka apa yang terjadi di Jakarta dua dekade terakhir telah berhasil menyebarkan ketakutan di tengah masyarakat. Mulai dari serangan di hotel berbintang hingga serangan difasilitas publik.

Munculnya kejahatan terorisme di DKI Jakarta tidak semata-mata mengindikasikan hal tersebut hanya terjadi di Jakarta dan tidak akan terjadi di IKN baru. Potensi kejahatan serupa juga hadir di IKN baru, namun dengan beberapa perbedaan yang cukup signifikan dan tentu akhirnya membutuhkan tindakan yang berbeda dari pemerintah.

Di DKI Jakarta, mayoritas kejahatan terorisme dimanifestasikan dalam wujud serangan yang cukup masif, seperti di Sarinah tahun 2016 dan Kampung Melayu tahun 2017. Tumbuhnya angka organisasi masyarakat Islam yang berbayat pada sistem kekhalifahan di Jakarta (Mubarok & Hamid, 2018, p. 39) tentu menjadi permasalahan tersendir bagi ibu kota. Bahkan penelitian Dirk Tomsa (2018) menyebutkan bahwa serangan yang terjadi di Plaza Sarinah tahun 2016 telah merubah pola gerakan terorisme dimana sebelumnya dilakukan terorganisir dan berbaiat pada kelompok Al-Qaeda dan turunannya menjadi serangan *lone-wolf* dengan baiat pada ISIS.

Berbeda dengan Jakarta, di IKN baru, kondisinya cenderung lebih stabil dan aman. Bila dilihat dalam skala wilayah, belum pernah tercatat aksi terorisme di kawasan IKN yang baru yaitu di sekitaran Kecamatan Sepaku. Meski secara statistik tidak pernah terjadi aksi terorisme di wilayah IKN baru, namun patut diingat bahwa eksistensi kelompok terorisme di Kalimantan Timur bukanlah isapan jempol belaka yang bisa dikesampingkan. Argumentasi ini dikuatkan dengan aksi terorisme yang terjadi pada tahun 2016 lalu di Samarinda telah terjadi pengeboman Gereja Oikumene yang dilancarkan oleh Jamaah Ansharut Daulah (JAD) sebagai salah satu dari sembilan sel jaringan ISIS. Hal tersebut menjadi signifikan untuk menjadi catatan pada pembangunan IKN baru nanti, mengingat Samarinda yang merupakan kota penyangga IKN baru bersama dengan Balikpapan.

Contoh lain seperti di Balikpapan dimana pada tahun 2016 terjadi penangkapan terhadap terduga teroris FJ oleh Densus 88. FJ disinyalir memiliki keterkaitan kuat dengan aksi bom Sarinah yang terjadi di tahun yang sama (Kurnia, 2016). Penangkapan oleh Densus 88 di Balikpapan pun tidak hanya sekali, setidaknya pada tahun 2021 ini sudah ada dua kali penangkapan terhadap terduga teroris. Pertama penangkapan terduga teroris SP di bulan Mei yang disinyalir memiliki hubungan kelompok JAD (Ibrahim, 2021). Kedua adalah penangkapan pasutri SN dan RR terduga teroris yang diduga terlibat bom Gereja Katedral Makassar.

Meski Kalimantan Timur relatif tergolong aman dalam isu aksi terorisme dibandingkan dengan Jakarta, bahkan menurut penelitian kuantitatif pulau Kalimantan adalah wilayah dengan aksi terorisme paling minim di Indonesia (Sandag, 2019). Meski begitu, tetap saja ancama terorisme tetap menjadi hal yang harus diperhatikan. Sebab, Kalimantan Timur menjadi kawasan yang cukup diminati oleh militan kelompok teroris untuk dijadikan sebagai basis kelompok mereka. Sebagai contoh, pelaku bom Gereja Oikumene, Muhammad Aceng Kurnia, adalah orang yang bergabung dengan JAD Kaltim (JPNN, 2016). Dimana secara koneksi, JAD Kaltim merupakan bagian dari Jamaah Ansharut Khalifah Daulah Nusantara (JAKDN) yang disinyalir sebagai kelompok yang bertanggung jawab pada bom Sarinah 2016 (Kassim, 2016) dan berafiliasi dengan ISIS (Gunaratna, 2016, p. 55). Lebih jauh, Muhammad Aceng bahkan seorang residivis yang sebelumnya menjadi pelaku teror bom di Tangerang pada tahun 2011 dan telah menjalani proses deradikalisasi di penjara selama 3.5 tahun namun tetap melakukan aksi teror pada 2016 setelah keluar dari penjara (Subagyo, 2021). Ini membuktikan bahwa Kalimantan Timur senyatanya menjadi basis pergerakan salah satu jaringan teroris di Indonesia yang juga berafiliasi dengan ISIS.

Hal ini diperkeruh dengan posisi Kalimantan Timur yang di daulat sebagai bagian dari Mantiqi Tsalis (wilayah III) dari empat wilayah operasi Jemaah Islamiyah yang secara khusus diperuntukkan sebagai supporting training camp dari basis utama di Mindanao dan menjadi basis militer utama untuk Indonesia (Solahudin, 2013, p. 157). Kamp pelatihan militer utama pada wilayah (Mantiqi) ini dikenal dengan nama kamp Hudaibiyah di Mindanao. Fungsi Kalimantan Timur kemudian selain menjadi wilayah pendukung untuk Latihan militer, juga menjadi sel logistik utama jaringan Jemaah Islamiyah. Tak heran bila Nasir Abbas, eks tokoh JI, kemudian mendaulat wilayah ini sebagai wilayah garap utama‘, yaitu wilayah dimana negara Islam yang dicita-citakan oleh JI akan diwujudkan (Safrudin, 2018, p. 122).

Secara umum, pemilihan Kalimantan sebagai salah satu lokasi pusat kegiatan terorisme di kawasan Asia Tenggara sudah dimulai sejak 2002 oleh Lashkar

Jundullah dengan tiga alasan utama. Pertama, bahwa Kalimantan memiliki tingkat konsentrasi militer yang rendah dengan luasan wilayah yang sangat besar (Conboy, 2006, p. 170). Bahkan dalam konteks wilayah Kalimantan dengan lima provinsi di dalamnya, hanya memiliki 2 Kodam yang bermarkas di Balikpapan dan Pontianak, 5 Polda yang tersebar di tiap provinsi, 2 Lantamal yang berjarak cukup jauh dari IKN baru yaitu di Tarakan dan Pontianak, dan 6 Lanud. Bila diperkecil dalam skala IKN baru, tentu infrastruktur pertahanan dan keamanan tersebut sangatlah minim.

Kedua, keadaan ini diperburuk dengan kontur wilayah yang berbukit dan tertutup hutan yang akhirnya membuat wilayah ini menjadi sangat tepat untuk basis militer. Seperti kita ketahui bahwa mayoritas wilayah Kalimantan adalah daratan yang diselimuti hutan. Menurut data statistik luas wilayah Kalimantan mencapai 743.440 kilometer persegi yang dilintasi setidaknya oleh 58 sungai besar dengan relief pegunungan dan perbukitan mencapai 39% dari total luas wilayah (Idhom, 2021).

Ketiga, kedekatan Kalimantan Timur dengan wilayah basis jaringan teroris lainnya di Asia Tenggara, seperti Mindanau dan Sabah, menjadikan wilayah ini secara geografis sangat strategis. Seperti yang dilansir oleh Safrudin (2013) dalam wawancaranya dengan Nasir Abbas yang menyebutkan bahwa Kalimantan sebagai Mantiqi Tsalis yang berperan penting dalam pengembangan jaringan terorisme di Asia Tenggara. Jaringan kuat kelompok teroris ini pernah dibuktikan pada kasus Ali Fauzi, perakit bom Bali, yang turut serta mendirikan kamp Hudaibiyah di Mindanao tahun 2002 lalu (BBC, 2017). Bahkan secara ideologis, kelompok JAD yang bersarang di Kalimantan Timur ternyata memiliki kesamaan paham dan tujuan dengan kelompok militant dan teroris di Filipina selatan, yaitu Moro Islamic Liberation Front dan Abu Sayyaf (Tempo, 2017). Gunaratna (2016) meyakini betul bahwa eksistensi kepemimpinan wilayah ISIS di Mindanao, Kalimantan, Sabah dan Sulawesi melalui Mantiqi Tsalis ini merupakan sebuah manifestasi ancaman yang nyata bagi stabilitas dan keamanan kawasan.

Ketiga alasan tersebut tentu menjadi potensi ancaman bagi IKN baru nanti yang memiliki letak geografis di tengah hutan Kalimantan Timur dan cukup jauh dari kota penyangga utama yang sudah eksis beserta infrastruktur pertahanan dan keamanan yang sudah ada. Berbeda dengan Jakarta yang saat menjadi ibu kota di sokong oleh infrastruktur pertahanan dan keamanan yang paripurna di sekelilingnya, menjadikannya memiliki pengamanan yang lebih dibandingkan dengan IKN baru nanti. Meski tidak bisa dipungkiri, ini juga berkaitan dengan jumlah penduduknya yang jauh lebih banyak dari IKN baru nanti beserta kota penyangganya. Maka, apakah dengan perpindahan markas besar TNI dan

Polri ke IKN baru lantas dapat meminimalisir ancaman terorisme ini? Tentu butuh studi lebih lanjut untuk menjawabnya.

Penyelundupan Narkoba dan Miras

Posisi Kalimantan Timur yang strategis juga menjadi akses utama penyelundupan narkoba dan miras dari Malaysia, terutama Tawau dan sekitarnya, yang diteruskan melalui Kaltara. Selain menjadi tujuan utama penyelundupan narkoba, Kalimantan Timur juga menjadi tempat transit bagi barang selundupan tersebut untuk berikutnya diteruskan ke Sulawesi. Penyalah gunaan narkoba yang semakin tinggi serta strategisnya provinsi Kalimantan Timur tentu akan menjadi lebih menggiurkan bagi pemasok narkoba bila mana provinsi ini kemudian menjadi sentra pemerintahan yang baru. Perpindahan penduduk yang masif tentu mengundang munculnya potensi konsumen baru dan meningkatnya permintaan atas narkoba.

Tidak berbeda dengan wilayah lain di Indonesia, Kalimantan Timur juga menjadi wilayah yang tidak bebas dari permasalahan tersebut, dibuktikan dengan Kaltim sebagai Provinsi urutan kelima pengguna narkoba tertinggi (Humas Pemprov Kaltim, 2019). Fakta ini menjadi menarik akhir-akhir ini karena meningkatnya penyelundupan narkoba ke wilayah Kutai Kartanegara dan Penajam Paser Utara. Setidaknya dalam beberapa tahun terakhir, BNN telah menyita hingga 100 kg narkoba dari dua kabupaten tersebut (CNN Indonesia, 2019). Bahkan yang terbaru pada tahun 2021, Polda Kaltim telah menggagalkan penyelundupan 25 kg sabu dari Sebatik, Kalimantan Utara (Kompas, 2021). Dilansir dari kantor berita Kompas, bahwa sabu yang dikirim dari Sebatik tersebut berasal dari Malaysia yang dikirim melalui perbatasan laut dan kemudian akan diedarkan di Balikpapan.

Selain narkoba, perdagangan miras pun cukup marak terjadi di Kalimantan Timur dimana produk tersebut dikirimkan dari Malaysia melalui perbatasan, untuk kemudian di sebar dari Nunukan. Seperti yang pernah digagalkan oleh Yonif 611/ Awang Long pada tahun 2017 lalu dimana sekitar 30 botol miras bermerek terkenal disita (Tribun News, 2017). Penyelundupan miras dan narkoba dari perbatasan ini marak terjadi karena harga yang cenderung lebih murah dibandingkan harga dari pengedar dalam negeri (Subagyo, 2021).

Geopolitik Kawasan Asia Pasifik

Meski dalam konteks keamanan dan pertahanan domestik perpindahan IKN ke Kaltim terkesan membawa atau melipat gandakan masalah, namun dalam konteks hubungan luar negeri cenderung statis. Politik luar negeri Indonesia diperkirakan tidak banyak berubah terkait dengan perpindahan IKN ke Kaltim. Perpindahan IKN

ini mendorong iklim investasi yang besar namun tidak merubah drastis kebijakan politik luar negeri Indonesia, terutama dalam isu geopolitik kawasan di Asia Pasifik. Polugri Indonesia akan tetap berpandangan bebas aktif dan pada aplikasinya akan tetap mendorong penggunaan soft diplomacy. Dalam kaitannya dengan stabilitas kawasan, posisi Indonesia akan tetap teguh untuk memperjuangkan hak atas sengketa wilayah dengan pihak lain. Untuk mewujudkan kawasan yang stabil, Indonesia juga senantiasa mendorong peace settlement process dan berpegangan pada prinsip non-intervensi.

Dalam konteks hubungan luar negeri, meski tidak aka nada perubahan yang cukup drastis dalam kebijakan luar negeri, namun perpindahan IKN baru ini tetap akan sedikit mempengaruhi pola hubungan Indonesia dengan negara lainnya. Seperti kita ketahui bahwa pemindahan IKN ini membutuhkan banyak sumber investasi, antara lain dari UEA, AS, Tiongkok, Jepang dan beberapa negara lainnya (lihat Mujiono & Sagena, 2020). Diantara deretan negara tersebut, Tiongkok disinyalir akan menjadi harapan besar Indonesia sebagai investor yang berperan cukup signifikan dalam pengembangan IKN baru nanti.

Tentu hal tersebut akan mempengaruhi bagaimana hubungan Indonesia terhadap Tiongkok di kemudian hari. Pendekatan yang lebih intens dan semakin dekat tentu akan dijalankan oleh Indonesia guna mendapatkan investasi yang besar dari Tiongkok. Sebagai balasan, tentu Tiongkok akan mendapatkan teman dekat baru di kawasan Asia Pasifik ini. Meski begitu, bukan berarti Indonesia akan beraliansi dengan Tiongkok dan secara terang-terangan memusuhi AS. Permainan yang cerdik perlu dilakukan Kemlu untuk mengakomodir hal ini dengan tetap berpegang pada politik luar negeri Bebas Aktif. Indonesia kemudian bisa menggunakan *strategy hedging,* yaitu mendekat ke Tiongkok untuk mengambil kesempatan sebanyak-banyaknya, namun tetap menjaga netralitas agar dapat meminimalisir resiko instabilitas kawasan dan resiko kerugian terhadap kepentingan negara (Goh, 2006).

Meski begitu, seperti yang sudah dijelaskan diatas, dalam konteks geopolitik kawasan Asia Pasifik tidak akan terlalu berpengaruh, termasuk pada arsitektur politik regional di ASEAN. Maka dari itu, ancaman isu keamanan tradisional (seperti perang) di kawasan IKN baru akan sangat minim potensinya, sebagaimana pada IKN di Jakarta saat ini. Pun pengaruh perpindahan IKN kepada stabilitas kawasan juga diyakini tidak berpengaruh signifikan. Hal ini juga dibuktikan dengan perpindahan ibu kota negara lainnya seperti di Australia, Brazil, Kazakhstan, India, bahkan negara sekawasan Asia Tenggara yaitu Myanmar, yang tidak berpengaruh pada peningkatan ancaman terhadap ibu kota baru mereka.

Merespon Ancaman Baru

Dalam merespon ancaman ini pemerintah perlu memformulasikan ulang kebijakannya agar ancaman tersebut dapat diminimalisir sebisa mungkin dan diantisipasi sedini mungkin. Langkah yang dapat pemerintah ambil antara lain adalah penguatan pasukan keamanan di tapal batas dalam rangka mencegah penyelundupan narkoba dan screening awal kombatan dari jaringan teroris di kawasan. Termasuk menguatkan kerjasama dengan Malaysia dibawah rezim *Defence Cooperation Program*. Selain itu, pemerintah juga harus melakukan penguatan keamanan di laut, terutama pada area Selat Makassar. Hal ini bertujuan untuk menghalau kapal-kapal ilegal yang bisa jadi merupakan kapal kombatan kelompok teroris dari luar Indonesia atau kapal berkedok pencari suaka yang ternyata turut serta membawa kombatan. Cara penyelundupan ini lazim digunakan oleh kelompok teroris global untuk mengkamuflase pengiriman kombatan dari atau menuju daerah konflik.

Secara garis besar, ancaman IKN baru datang dari isu non-tradisional, penyelundupan narkoba dan terorisme. Hal ini akan semakin kompleks sejalan dengan bertambahnya penduduk secara mendadak akibat dari proses migrasi besar-besaran menuju IKN baru. Tidak hanya migrasi PNS, namun urbanisasi penduduk juga akan terjadi sebagai konsekuensi dari terbentuknya kota baru yang lebih layak huni dari kota asal sebelumnya. Serta menjadi kota baru yang menjanjikan kesejahteraan bagi masyarakat dari luar kawasan ini. Karena perpindahan penduduk inilah, maka perpindahan ancaman keamananpun turut menyertainya. Selain urbanisasi yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia, potensi migrasi juga memungkinkan dilakukan oleh sebagian warga negara asing terutama yang secara geografis berdekatan dengan IKN baru, seperti WNA Malaysia dari Sabah dan Serawak atau Filipina selatan.

Tantangan pemerintah Indonesia di IKN baru akan semakin besar karena keterbatasan sumber daya dalam mengelola dan mengantisipasi ancaman-ancaman tersebut. Saat IKN baru terbentul, kawasan ini akan minim sarana dan prasarana militer atau perangkat keamanan dan institusi serupa. Benar bahwa mabes Polri dan TNI akan ikut dipindahkan ke IKN baru, namun patut diingat, sumber daya militer dan keamanan yang sudah mapan di wilayah ini tidaklah semasif DKI Jakarta. Bagi DKI Jakarta ada zona penyangga seperti Banten dan Jawa Barat yang turut serta menurunkan potensi ancaman di ibu kota atau bahkan turut serta turun mengamankan ibu kota dengan respon cepat bila dibutuhkan. Sebagai contoh, saat demonstrasi besar-besaran 212 dimana akhirnya pemerintah menurunkan aparat keamanan dari wilayah penyangga dengan cepat. Hal ini berbeda dengan keadaan IKN baru nanti, zona penyangga yang ada hanya provinsi Kalimantan Timur dengan satu Kodam dan satu Polda. Alhasil,

tingkat respon terhadap mitigasi ancaman pun menjadi lemah.

Kesimpulan

Perpindahan IKN baru ke Kalimantan Timur tentu akan memunculkan ancaman baru bagi kawasan tersebut. Dari hasil analisa yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa dalam jangka pendek dan menengah, ancaman yang ada di kawasan IKN baru saat nanti sudah terbentuk cukup minim. Meski begitu, perlu tetap menjadi perhatian terutama ancaman terorisme di Kalimantan dan penyelundupan narkoba dan miras dari perbatasan. Meski tidak signifikan dibanding ancaman yang sama di Jakarta, tetap saja perhatian lebih harus diberikan pada isu ini mengingat migrasi dan urbanisasi akan terjadi dalam skala besar dan tempo yang cukup singkat. Akan sulit bagi pemerintah bila tidak menyiapkan infrastruktur keamanan dan pertahanan yang memadai sedari awal didirikannya IKN baru ini. Di sisi lain, dalam konteks hubungan internasional dan ancaman keamanan tradisional, diperkirakan akan sangat minim berpengaruh mengingat kebijakan luar negeri Indonesia yang akan masih berpegang teguh pada politik Bebas Aktif.

Daftar Pustaka

BBC News. (2017). Milisi Indonesia masuk ke Filipina selatan melalui pulau Sebatik. BBC News. Diakses dari https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-40197725

Citradi, T. (2019). Apa salah Jakarta sampai ibu kota harus pindah segala?. CNBC Indonesia. Diakses dari https://www.cnbcindonesia.com/news/20190919123832-4-100646/apa-salah- jakarta-sampai-ibu-kota-harus-pindah-segala.

CNN Indonesia. (2019). BNN sebut penyelundupan narkoba ke ibu kota baru meningkat. CNN Indonesia. Diakses dari https://www.cnnindonesia.com/nasional/20191205211704-12- 454618/bnn-sebut-penyelundupan-narkoba-ke-ibu-kota-baru-meningkat.

Conboy, K. (2006). The second front: inside Asias most dangerous terrorist network. Jakarta: Equinox Publishing.

Goh, E. (2006). Understanding Hedging in Asia-Pacific security. Hawaii: Pacific Forum CSIS.

Gunaratna, R. (2016). The Islamic State's eastward expansion. The Washington Quarterly, 39(1), 49-67. doi.org/10.1080/0163660X.2016.1170479.

Hoffman, B. (2006). Inside terrorism, rev. edition, Columbia University Press, New York. Humas Pemprov Kaltim. (2019). Peringkat Narkoba Kaltim menurun, kepala BNN apresiasi Pemprov Kaltim. Pemprov Kaltim. Diakses dari https://kaltimprov.go.id/berita/peringkat-narkoba-kaltim-turun-kepala-bnn-apresiasi-pemprov-kaltim.

Ibrahim, I. (2021). Terduga teroris yang ditangkap di Balikpapan diduga kelompok JAD. Tribun News. Diakses dari https://www.tribunnews.com/nasional/2021/06/07/terduga-teroris- yang-ditangkap-di-balikpapan-diduga-kelompok-jad.

Idhom, A. (2021). Kondisi geografis pulau Kalimantan berdasarkan peta & bentang alam. Tirto. Diakses dari https://tirto.id/kondisi-geografis-pulau-kalimantan-berdasarkan-peta-bentang- alam-gjAy.

JPNN. (2016). 10 Fakta penting tentang pelaku bom Samarinda. JPNN.com. Diakses dari https://www.jpnn.com/news/10-fakta-penting-tentang-pelaku-bom-samarinda

Kassim, Y.Z. (2016). The Jakarta assault: pre-empting the rise of IS Indonesia. RSIS Commentary, no. 17.

Kolb, E. (2019). 75.000 people per square mile? These are the most densely populated cities in the world. USA Today. Diakses dari https://www.usato day.com/story/news/world/2019/07/11/the-50-most-densely-populated- cities- in-the-world/39664259/ .

Kompas. (2021). Cerita penyelundupan 25 kg sabu dari Sebatik ke Balikpapan, diangkut perahu cepat selama 4 hari. Kompas. Diakses dari https://regional.kompas.com/read/2021/05/12/112855478/cerita-penyelundupan-25-kg- sabu-dari-sebatik-ke-balikpapan-diangkut-perahu?page=all.

Kurnia, N. (2016). Densus 88 ciduk terduga teroris di Balikpapan, terlibat bom Sarinah?. Bisnis.com. Diakses dari dari https://kalimantan.bisnis.com/read/20160115/407/510071/densus-88-ciduk-terduga- teroris-di-balikpapan-terlibat-bom-sarinah .

Lin, M.M. & Hidayat, R. (2018). Jakarta, the fastest-sinking city in the world. BBC News. Diakses dari https://www.bbc.com/news/world-asia-44636934.

Mubarok, M.Z. & Hamid, A.F. (2018). The rise of radicalism and terrorism in Indonesia and Malaysia. Review of Islam in Southeast Asia, 1(1), 29-43..

Mujiono, D. & Sagena, U. (2020). Opportunities of international cooperation in relocating the new capital of Indonesia. Interdependence: Journal of International Studies, 1(1), 1-10.

Prireza, A., (2020). Jakarta ranked 10th on the world‘s most congested cities list. Tempo. Diakses dari https://en.tempo.co/read/1303052/jakarta-ranks-10th-on-worlds-most-congested- cities-list.

Safrudin, R. (2018). Penanggulangan terorisme di Indonesia melalui penanganan pendanaan terorisme: studi kasus Al-Jamaah Al-Islamiyah (JI). Jurnal Pertahanan, 3(1), 113-137.

Sandag, G. (2019). Exploratory data analysis towards terrorist activity in Indonesia using machine learning techniques. Abstract Proceedings International Scholars Conference, 7(1), 1774- 1785.

Solahudin. (2013). The roots of terrorism in Indonesia: from Darul Islamiyah to Jemaah Islamiyah. Sydney: UNSW Press.

Subagyo, A. (2021). Peran TNI dalam mengamankan wilayah perbatasan darat Indonesia-Malaysia‘, Insignia: Journal of International Relations, 8(1), 19-36. doi.org/10.20884/1.ins.2021.8.1.2673.

Subagyo, A. (2021). The implementation of the pentahelix model for the terrorism deradicalization program in Indonesia. Cogent Social Science, 7(1). doi.org/10.1080/23311886.2021.1964720.

Tempo. (2017). BNPT: Kombatan Indonesia di Marawi anggota JAD. Tempo.co. Diakses dari https://nasional.tempo.co/read/882547/bnpt-kombatan-indonesia-di-marawi-anggota-jad .

Tomsa, D. (2018). The Jakarta terror attack and its implications for Indonesian and regional

security. Perspective, no. 5.

Tribun News. (2017). Tentara yang jaga perbatasan amankan miras di pangkalan ojek. Tribun News. Diakses dari https://www.tribunnews.com/regional/2017/02/02/tentara-yang-jaga- perbatasan-amankan-miras-di-pangkalan-ojek.

POTENSI BENCANA IKN DAN HARAPAN MASA DEPAN

Yulian Widya Saputra & Muhammad Azmi
FKIP Universitas Mulawarman

Pendahuluan

Perpindahan Ibu Kota Negara (IKN) dari Jakarta ke Kalimantan Timur tentunya melalui berbagai kajian. Kurniadi (2019) menyatakan bahwa kajian pemindahan ibukota tersebut sudah digagas pada masa pemerintahan empat presiden, yaitu Soekarno, Soeharto, Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo. Menelisik lokasi DKI Jakarta pada beberapa akhir tahun ini selalu dibayangi oleh bencana alam dan sosial. Menurut BPBD DKI Jakarta (2018) dan Bappenas (2021) potensi bencana yang ada sekarang ini adalah adanya banjir kiriman, banjir rob, kebakaran permukiman, dan konflik sosial. Kondisi geografis Kota Jakarta merupakan tumpuan pertemuan kali atau sungai yang datang dari daerah Selatan mempunyai kemiringan sangat tinggi dan ke Utara semakin rendah. Demikian pula DKI Jakarta terletak di bawah permukaan laut, sehingga dapat dikategorikan Jakarta belum bebas dari ancaman banjir. Hal ini biasa terjadi setiap tahun terutama pada bulan Desember, Januari dan Februari.

Keterpaduan masalah yang kompleks diatas makin jauh hari menjadi salah satu pertimbangan pemerintah pusat dalam memindahkan ibukota negara. Hasibuan & Aisa (2020) menyebutkan pemindahan IKN dikarenakan beban DKI Jakarta sebagai pusat pemerintahan dan pusat bisnis sudah terlampau tinggi.

Pemindahan IKN juga bertujuan untuk mengurangi ketimpangan ekonomi antara Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa. Ketimpangan ini nampak pada hadirnya konflik di beberapa wilayah Indonesia Timur. Ketimpangan ini selama puluhan tahun membekas sehingga muncul aggapan Jawasentris. Sekretaris Kabinet RI (2019) mneyatakan bahwa pemidahan ibukota bertujuan agar kedepannya pembangunan IKN mampu menjadi pandangan Indonesia sentris.

Ancaman Bencana Alam di IKN

Pemilihan lokasi IKN terpilih, yakni Propinsi Kalimantan Timur tentunya melalui berbagai pertimbangan pemerintah. Pertimbangan tersebut salah satunya dilatarbelakangi aspek minimnya bencana di provinsi yang dikenal dengan

istilah Benua Etam. Agus Wibowo (2020) menguatkan bahwa Kalimantan, khususnya Kalimantan Timur merupakan wilayah yang memiliki risiko bencana paling sedikit dibanding wilayah lain di Indonesia. Wilayah yang berada paling timur di Borneo itu memiliki tingkat kerawanan paling rendah baik mulai dari ancaman bencana geologi, vulkanologi, hidrometeorologi dan jenis ancaman bencana lainnya.

Ditinjau dari aspek geologi potensi gempa bumi dan tsunami di wilayah calon IKN yakni sebagian Kabupaten Penajam dan Kutai Kertanegara ini aman dari bencana tersebut. BNPB (2020) menjelaskan potensi gempa bumi di wilayah IKN ini kurang dari skala magnitudo 5. Namun demikian potensi gempa tetap ada dan perlu diwaspadai. Hal ini disebabkan di wilayah dekat IKN terutama di Penajam terdapat sesar Adang. Sesar dikenal lama sebagai bagian dari muka bumi yang aktif secara tektonik.

Gempa Kalimantan Timur menempati orientasi bidang sesar, yaitu pada bidang nodal Strike 158- 174, Dip 85-89 dan Rake 2-179 (Soeria,1999; Erviwan, 2011; Rusmilawati, 2019). Solusi mekanisme dari gempa Kalimantan Timur adalah sesar geser *(strike-slip)*. Adapun hal yang mengakibatkan terjadinya gempa bumi Kalimantan bagian timur, merupakan jenis sesar geser (strike slip). Oleh karena itu potensi gempa di IKN tetap ada namun tidak diklasifikasikan gempa yang merusak akibat nilai dari magnitudo yang relatif kecil yakni magnitudo kurang dari 5.

Aspek bencana kegunungapian atau vulkanologi di wilayah IKN boleh dikatakan tidak ada ancaman. Wilayah Penajam dan Kutai Kertanegara yang sebagian dari kedua kabupaten tersebut dipergunakan sebagai IKN merupakan bagian dari formasi geologi Balikpapan. Formasi ini dilalui bentangan besar geomorfologi struktural, yakni antiklinorium Samarinda. Formasi Balikpapan itu sendiri terdiri dari satuan batu gamping, satuan batu pasir, batu lanau, dan satuan batupasir sisipan batu bara. Ghazy (2020) penelitiannya menjelaskan struktur yang terdapat pada daerah penelitian berupa lipatan antiklin yang memiliki arah NNE-SSW. Hasil dari analisis provenance didapatkan bahwa sumber sedimen pembentuk batu pasir Formasi Balikpapan memiliki *provenance recycled orogenic, sub-zona quartzose recycled*, berasal dari tatanan tektonik *collision suture & fold-thrust-belt*, dan memiliki sumber sedimen yang relatif seragam dan tidak memiliki pengaruh dari aktivitas vulkanik.

Selanjutnya ancaman bencana hidrometeorologi di wilayah IKN ini dapat dideskripsikan berupa bencana banjir, angin kencang, kekeringan, dan kebakaran hutan dan lahan. Berdasarkan data BNPB (2020) Kalimantan Timur juga merupakan provinsi yang paling sedikit terdampak Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) dibanding wilayah lain di Kalimantan. BNPB sejak 2015 hingga 2019, Kalimantan Timur bahkan tidak masuk dalam 5 besar wilayah yang terdampak

Karhutla, seperti wilayah Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Nusa Tenggara Timur, Sumatera Selatan dan Kalimantan Selatan.

Kasus Karhutla yang menjadi ancaman IKN ini berasal dari wilayah Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat. Dampak dari karhutla tersebut perlu diperhatikan, sebab polusi asap yang tebal menganggu jalur penerbangan di langit Kalimantan. Selain itu adanya gangguan kesehatan masyarakat di Kalimantan khususnya di IKN kedepannya nanti perlu diperhatikan.

IKN dan Ancaman Konflik Sosial

Aspek bencana yang dikategorikan bencana sosial diantaranya aneka macam konflik akibat kesenjangan pada unsur-unsur suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA). Sumber utama penyebabnya diantaranya benturan nilai-nilai lokal yang masih dianut cenderung bersifat kesukuan, keagamaan, rasial, kedaerahan dan masalah tanah. Berbagai masalah ini sering terjadi apabila segenap elemen masyaraakt dan pemerintah mengatasinya secara dini. Permasalahan tersebut ditambah kesenjangan taraf hidup, dimana sering menimbulkan kecemburuan sosial yang mengakibatkan tindak kriminalitas. Masalah lingkungan hidup untuk masa mendatang akan merupakan hal yang penting bahkan secara politis dapat mempengaruhi perkembangan hidup masyarakat khususnya di ibukota.

Ancaman bencana sosial di IKN kedepannya perlu diwaspadai pula. Seperti dijelaskan di awal tulisan ini dimana di DKI Jakarta sendiri faktor keberagaman menjadi tantangan dalam pembangunan manusia. Sebab pembangunan manusia di IKN pondasi penting selain aspek fisik seperti bangunan, jalan, pelabuhan, taman, danau dan lain sebagainya. Dengan demikian penduduk IKN merupakan kebhinekaan satu bangsa yang berbeda agama dan adat istiadat, ditambah pula dengan pertambahan penduduk, menimbulkan persaingan dalam berbagai sendi kehidupan. Hal ini pada akhirnya dapat menimbulkan masalah baik itu vertikal maupun horisontal.

Di Kalimantan Timur, khususnya di wilayah pembangunan IKN yakni di Penajam-Kutai Kertanegara kedepannya memiliki potensi akan adanya bencana sosial. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Definisi tersebut menyebutkan bahwa bencana disebabkan oleh faktor alam, non alam, dan manusia. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 24 (2007) tersebut juga mendefinisikan mengenai bencana alam, bencana non alam, dan

bencana sosial.

Undang-Undang Nomor 24 (2007) kebencanaan sosial ini dimaknai sebagai konflik sosial atau kerusuhan sosial atau huru hara adalah suatu gerakan massal yang bersifat merusak tatanan dan tata tertib sosial yang ada, yang dipicu oleh kecemburuan sosial, budaya dan ekonomi yang biasanya dikemas sebagai pertentangan antar suku, agama, ras (SARA). Wilayah di Penajam-Kutai Kertanegara yang sebagian dijadikan IKN ini memiliki kerentanan akan bencana sosial. Hal ini dikhawaatirkan akan berdampak lebih luas jika pembangunan IKN disertai ledakan penduduk baru di luar Kalimantan Timur.

Kodir, et al (2021) menyimpulkan bahwa terdapat pandangan positif dan negatif dari rencana pemindahan IKN. Di satu sisi, pandangan positif optimis bahwa perpindahan tersebut memberikan dampak pada peningkatan sosial-ekonomi masyarakat. Di sisi lain, pandangan negatif menolak perpindahan tersebut dengan alasan lahan yang digunakan diklaim merupakan hutan adat masyarakat.

Yuniarti (2018) menegaskan bahwa keberagaman kondisi ekonomi, sosial budaya, dan agama yang seyogyannya menjadi modal dasar dalam pembangunan IKN, justru menjadi sumber konflik sosial di Provinsi Kalimantan Timur. Upaya penanganan melalui mediasi atau pendekatan persuasif yang dilakukan oleh Tim Penanganan Konflik Sosial, yang terdiri dari unsur pemerintah dan tokoh-tokoh masyarakat, hanya merupakan manajemen konflik tentatif yang hanya mampu menyelesaikan konflik sesaat. Ketidakmampuan masyarakat memahami keberagaman dan kerukunan hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta membangun toleransi menyebabkan masyarakat akan sangat mudah terdisintegrasi. Pada gilirannya konflik sosial menjadi hasil akhir dari perbedaan-perbedaan yang tidak bisa ditoleransi oleh masyarakat.

Di wilayah yang sekarang ini dijadikan IKN telah beberapa kali terjadi gesekan horisontal yang cenderung mengarah pada pertentangan antar suku, agama, ras dan antar golongan (SARA). Peristiwa yang terbaru yakni pada tahun 2019 terjadi kerusuhan cukup besar di Penajam. Kerusuhan tersebut terjadi pada tanggal 16 Oktober 2019 ketika sekelompok massa membakar rumah dan fasilitas umum di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Kerusuhan ini bermula ketika terjadi perkelahian dan pembunuhan terhadap anak Kepala Adat Suku Paser oleh anak dari Suku Bajau Bugis. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat 144unit rumah, 1unit sarana pendidikan, dan 10 unit kios/warung terbakar akibat kerusuhan ini. Kerugian material akibat kerusuhan ini mencapai Rp. 7,3 miliar yang terbagi dalam tiga kategori, yaitu kerusakan dan kerugian perumahan sebanyak Rp. 5,3 miliar. Sementara, kerugian sosial pendidikan sebanyak Rp.1,6 miliar

dan kerugian perdagangan Rp. 335 juta.

Pasca-kerusuhan, upaya mediasi dilakukan oleh pemerintah bersama tokoh masyarakat setempat pada 17 Oktober 2019. Dari mediasi itu ditelurkan dua poin kesepakatan. Pertama, masyarakat adat Paser akan melaksanakan sidang adat yang dihadiri oleh tokoh-tokoh besar adat Dayak secara internal tanpa keterlibatan aparat hukum. Kedua, semua peserta sepakat untuk meredam amarah masyarakat adat Dayak Paser yang berada di wilayah Kabupaten Paser, khususnya Kecamatan Long Kali agar tidak melakukan tindakan-tindakan yang dapat mengganggu stabilitas keamanan serta merugikan masyarakat banyak.

Peristiwa ini menggambarkan sebagian kecil adanya potensi bencana sosial yang ditimbulkan oleh SARA. Hal ini diperkuat oleh Dinsos Kaltim (2014) dimana meskipun tidak masuk dalam kategori daerah rawan konflik dari Kementerian Sosial, sesungguhnya konflik sosial juga menjadi permasalahan serius di Kalimantan, termasuk di Kalimantan Timur. Untuk Kalimantan Timur, Dinas Sosial Provinsi berhasil memetakan lima daerah rawan konflik sosial meliputi Samarinda, Balikpapan, Paser, Penajam Paser Utara (PPU) dan Kutai Barat. Konflik sosial yang terjadi di Kaltim sangat kompleks dan dinamis, yang disebabkan antara lain karena permasalahan politik (masalah pemilihan, kebijakan pemerintah yang tidak populer, dll), ekonomi (sumber daya ekonomi, letak geografis, dll), sosial (SARA) dan budaya (tradisi dan adat istiadat).

Kapiarsa (2020) menyatakan bahwa potensi ancaman terorisme di wilayah IKN cukup besar, sehingga diperlukan kerjasama pertahanan dan keamanan antar wilayah dan juga negara tetangga yang solid. Perspektif selanjutnya adalah potensi ancaman bencana di wilayah calon Ibukota Negara (IKN). Pemilihan lokasi dari IKN ini oleh pemerintah tentu mempertimbangkan aspek kebencanaan yang ada. Pembangunan pusat ibukota ini kedepannya menjadi pusat dari pemerintahan yang aman dari bencana. Keamanan ibukota dari bencana tentu akan mendukung program-program pembagunan berkelanjutan yang menjadi poin penting di IKN.

Realisasi IKN dan Harapan Masa Depan

Kurniawan, et al (2021) menyatakan bahwa pemindahan IKN yang sejatinya direalisasikan pada 2024 kemungkinan besar akan terhambat. Hal ini dikarenakan dana pemerintah difokuskan untuk penanganan pandemic Covid-19. Namun, menurut Mujiono & Sagena (2020), hal ini justru merupakan peluang kerjasama internasional dalam melaksanakan proyek pemindahan IKN yang bersifat multisektor dan multiaktor.

Pemindahan IKN ke Kalimantan Timur tentunya akan berdampak pada wilayah sekitar, sebut saja Balikpapan dan Penajam Paser Utara. Kedua daerah

tersebut merupakan daerah terdekat dengan lokasi IKN dan tentunya akan menjadi daerah penyangga ibukota. Wardhana (2021) menawakan dua strategi untuk mengoptimalkan daerah penyangga ibukota, yaitu pembentukan Badan Kerjasama Pembangunan Daerah untuk mendukung IKN dan pembentukan sebuah daerah khusus untuk meningkatkan ketahanan daerah penyangga ibukota.

Sejatinya harapan adanya pemindahana IKN adalah mengubah stereotip pembangunan yang semula dianggap — Jawa sentris menjadi — Indonesia sentris. Hal ini mengingat kedepannya akan ada perpindahan penduduk terutama pegawai pusat yang — hijrah dari Jakarta ke IKN baru. Perpindahan ini harapannya memberikan dampak positif berupa pola kerja ibukota yang profesional dan kompetitif. Dengan demikian sifat-sifat kedaerahan sebisa mungkin di IKN nanti dihindari agar pembangunan tidak terganggu oleh bencana sosial berupa konflik masyarakat baik vertikal maupun horisontal. Terlebih lagi kondisi lingkungan atau alam IKN baru ini — lebih aman dari bencana alam. Taufiq (2017) menegaskan bahwa adanya peluang dalam menciptakan pemerataan ekonomi melalui kebijakan pemindahan ibu kota. Hal ini berdasarkan beberapa asumsi, yaitu kemunculan pusat-pusat pertumbuhan skala nasional baru di luar Pulau Jawa, arus migrasi penduduk, investasi, konektifitas internal dan konektivitas eksternal. Asumsi tersebut memiliki dasar yang kuat untuk diwujudukan seiring berjalannya waktu. Pandit (2019) menyatakan bahwa Kalimantan Timur sebagai wilayah IKN perlu memperhatikan 3 aspek. Pertama, menyiapkan berbagai dampak kemungkinan yang akan terjadi, baik positif maupun negatif bagi lingkungan hidup. Kedua, pembuatan tata ruang yang kompehensif dan taat azas terhadap peruntukkannya, Ketiga, ketegasan dalam penyelesaian sengketa hukum. Ketiga aspek tersebut diharapkan dapat meminimalisir beban besar dalam pembangunan infrastruktur dalam mega proyek tersebut.

Hidayat & Mardiana (2021) menyimpulkan bahwa secara umum masyarakat Penajem Paser Utara menerima secara terbuka rencana pemindahan IKN. Dalam penelitian tersebut diketahui bahwa masyarakat meyetujui kebijakan pemindahan ibu kota negara, bersedia menerima segala dampak dan alasan pemindahan yang sebelumnya telah mereka ketahui melalui berbagai sumber infomasi. Sujana (2019) menyimpulkan bahwa penguasaan tanah Adat oleh masyarakat hukum adat di Kalimantan Timur yang merupakan lokasi dari rencana Ibu Kota Negara Republik Indonesia perlu medapatkan kepastian. Hal ini dilakukan dengan dengan mengimplementasikan berbagai pengaturan yang mengakui penguasaan eksistensi tanah adat oleh masyarakat hukum adat seperti yang tertuang dalam konstitusi. Melalui implementasi tersebut diharapkan penguasaan tanah-tanah

adat oleh masyarakat hukum adat benar-benar bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat hukum adat, tanpa menghambat pembangunan Ibu Kota Negara yang merupakan kepentingan yang harus diutamakan.

Sejatinya, rencana pemindahan IKN ke Kalimantan Timur merupakan tantangan sekaligus peluang bagi masyarakat Banua Etam, khususnya masyarakat hukum adat untuk meningkatkan kesejahteraan hidup dengan cara memanfaatkan dan mengatur penguasaan tanah. Tujuan utama dari pengaturan tanah adat adalah untuk mencegah kerusakan lingkungan sebagai alat penjaga keseimbangan dan keharmonisan antara kepentingan pemerintah dan kepentingan masyarakat adat.

Kesimpulan

Rencana Pemindahan IKN ke Kalimantan Timur seyogyanya merupakan hal prioritas bagi pemerintah. Potensi bencana, baik alam maupun non alam sejatinya merupakan hal yang tidak dapat dihindari. Pemilihan wilayah IKN tentunya melewati berbagai tahapan yang tidaklah sebentar. Kajian terkait potensi bencana di wilayah IKN tentunya menjadi pertimbangan pemerintah sebelum memulai realisasi pembangunan. Persetujuan masyarakat adat Kalimantan Timur merupakan modal awal dalam menyukseskan mega proyek ini.

Daftar Pustaka

Bappenas. 2021. POTENSI DAN KEJADIAN BENCANA ALAM DI PROVINSI DKI JAKARTA. (Online) https://www.bappenas.go.id/index.php/download_file/view/14065/3930/ diakses 28 September 2021 Erviawan. 2010. Lipatan. Makassar. UIN Makassar

Ghazy. 2020. Pemetaan Geologi dan Analisis Provenance Batupasir Formasi Balikpapan pada daerah Sepaku Penajam Paser Utara Kalimantan Timur. Laporan Penelitian. (Online)

Hasibuan dan Aisa. 2020. DAMPAK DAN RESIKO PERPINDAHAN IBU KOTA TER HADAP EKONOMI DI INDONESIA. Jurnal AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam, Volume V, No. 1 Januari–Juni 2020: 183-203 (online) http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/tawassuth/article/download/7947/3697 diakses 28 September 2021

Hidayat, R., & Mardiana, M. Persepsi Publik Terhadap Rencana Kebijakan Pemindahan Ibu Kota Negara Indonesia. Jurnal Neo Societal, 6(2), 120-134.

INGUB DKI Jakarta no 133 Tahun 2018 tentang Kesiapsiagaan dan Antisipasi Bencana Banjir, Tanah Longsor, dan Angin Kencang Pada Musim Hujan. (Online), https://bpbd.jakarta.go.id/wp-content/uploads/2020/10/Ingub_No_133_Tahun_2018.pdf diakses 28 September 2021.

Kapiarsa, A. B. (2020). Penanganan Potensi Ancaman Terorisme di Ibu Kota Baru Indonesia Studi Kasus: Kabupaten Kutai Kartanegara dan Penajam Paser Utara. Manajemen Pertahanan: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Manajemen Pertahanan, 6(2).

Kodir, A., Hadi, N., Astina, I. K., Taryana, D., & Ratnawati, N. (2021). The dynamics of community response to the development of the New Capital (IKN) of Indonesia. In Development, Social Change and Environmental Sustainability (pp. 57-61). Routledge.

Kurniadi, A. (2019). Pemilihan Ibukota Negara Republik Indonesia Baru Berdasarkan Tingkat Kebencanaan. Jurnal Manajemen Bencana (JMB), 5(2).

Kurniawan, D., Suswanta, S., Nurmandi, A., & Salahudin, S. (2021). Analysis of the Consistency Policy Indonesia‘s Capital Relocation in the Pandemic Era. Jurnal Studi Sosial Dan Politik, 5(1), 35-48. https://doi.org/https://doi.org/10.19109/jssp.v5i1.7865.

Mujiono, D. I. K., & Sagena, U. W. (2020). Opportunities of International Cooperation in Relocating the New Capital of Indonesia. Interdependence Journal of International Studies, 1(1).

Noegroho, G. P. A. (2020). PEMETAAN GEOLOGI DAN ANALISIS PROVENANCE BATUPASIR FORMASI BALIKPAPAN PADA DAERAH SEPAKU, PENAJAM PASER UTARA, KALIMANTAN TIMUR (Doctoral dissertation).

Priadi B., (1994). Teriary Magmatic Belts in Java, Journal of Southeast Asian Earth Sciences, Vol. 9, No. I/2, pp. 13-27, Great Britain Pergamon Press Ltd

Rahmah, Laili Aulia. (2020). Kerusuhan di Penajam Paser Utara. (online) https://www.scribd.com/document/437806038/Kerusuhan-di-Penajam-Paser-Utara-docx diakses 28 September 2021.

Rusmilawati, D., Djayus, D., & Lepong, P. (2019). STUDI MEKANISME SUMBER GEMPABUMI DI WILAYAH KALIMANTAN BERDASARKAN GERAK AWAL GELOMBANG P. GEOSAINS KUTAI BASIN, 2(2).

Sekretaris Kabinet Republik Indonesia; Infrastuktur Untuk Negeri "Kumpulan Pidato Presiden RI 2014-2019 (ONLINE) https://setkab.go.id/wp-content/uploads/2020/08/01-ISI- BUKU-INFRASTRUKTUR.pdf diakses 28 September 2021.

Soeria-Atmadja, R., Noeradi, D., & Priadi, B. (1999). Cenozoic magmatism in Kalimantan and its related geodynamic evolution. Journal of Asian Earth Sciences, 17(1-2), 25-45.

Sujana, I. N. (2019). Penguatan Hak Penguasaan Tanah Adat Masyarakat Hukum Adat di Kalimantan Timur sebagai Rencana Ibu Kota Negara. Ganaya: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora, 2(2-2), 49-57. Retrieved from http://jayapanguspress.penerbit.org/index.php/ganaya/article/view/371

Suranaya Pandit, I. G. (2019). Dampak Pengelolaan Lingkungan Hidup Bagi Kalimantan Timur Sebagai Ibu Kota Negara Serta Penyelesaian Sengketa Hukumnya. Ganaya : Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora, 2(2-2), 15-21. Retrieved from http://jayapanguspress.penerbit.org/index.php/ganaya/article/view/367.

Taufiq, M. (2017). Pemindahan ibu kota dan potensi konektivitas pemerataan ekonomi. Prosiding Semas Pemindahan Ibu Kota Negara 2017.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2007 TENTANG PENANGGULANGAN BENCANA. (Online) https://bnpb.go.id/ppid/file/UU_24_2007.pdf diakses 28 September 2021

Wardhana, I. G. (2021). Enhancing Resilience in Balikpapan as Buffer Zone for the New Capital City of Indonesia (Doctoral dissertation).

Wibowo, Agus. (2020). Kepala BNPB: Wilayah Kalimantan Timur Minim Ancaman Bencana. Samarinda: BNPB (online) https://bnpb.go.id/berita/kepala-bnpb-wilayah-kalimantan-timur- minim-ancaman-bencana diakses 28 September 2021.

Yuniarti. (2018). UPAYA PENANGANAN KONFLIK SOSIAL DI KALIMANTAN TIMUR (STUDI KASUS: SAMARINDA, BALIKPAPAN, KUTAI TIMUR). *Jurnal Paradigma*, Vol.7, No.3, Desember 2018E-ISSN:2615-3394,(Online) http://e-journals.unmul.ac.id/index.php/JParadigma/article/download/1933/1465 diakses 29 September 2021

studi Magister (S2) di FKM Universitas Indonesia (UI). Salah satu publikasi Internasional mengenai efektivitas media kesehatan mengenai HIV-AIDS telah dipublikasi pada Seminar Internasional Australasian HIV & AIDS Conference tahun 2015 yang diselenggarakan di Brisbane, Australia. Penelitian mengenai rokok dengan judul *Cigarette Sales Promotion Pattern and Smoking Behavior of Traders In Mulawarman University, Samarinda* juga telah dipublikasikan di salah satu jurnal nasional terindex. Artikel ilmiah yang telah disampaikan di Seminar Nasional berjudul Kajian Tingkat Adiksi Merokok Siswa di SMP YPS Samarinda menggunakan *Fagerstorm Test For Nicotine Dependence* (FTND). Alamat email: rizahayatiifroh@fkm.unmul.ac.id

Ratih Wirapuspita Wisnuwardani

Lahir di Samarinda, 11 Nopember 1982. Sarjana Kesehatan Masyarakat diperoleh dari Universitas Airlangga, Surabaya, tahun 2000. Pada tahun 2011, beliau menyelesaikan Magister of Public Health di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, pada tahun 2011. Beliau kemudian mendapatkan doctoral degree di Faculty of Medicine and Health Science, Ghent University, Ghent, Belgia pada tahun 2020. Sejak tahun 2005 hingga sekarang, beliau menjadi dosen tetap di Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM), Universitas Mulawarman (Unmul). Saat ini, beliau menjabat sebagai Wakil Dekan di bidang akademik, kemahasiswaan dan alumni FKM Unmul, dan founder Nutrition Education Centre (NutreCent)yang fokus pada penelitian dan pengabdian masyarakat untuk promosi konsumsi sayur dan buah. Beberapa artikel beliau mengenai konsumsi makanan yang berbasis tumbuhan dan manfaatnya bagi kesehatan pada remaja Eropa telah terbit di beberapa jurnal Q1. Beliau juga memperhatikan pemberdayaan masyarakat melalui posyandu dalam pencegahan stunting, yang telah publish artikelnya. Beliau juga menjadi reviewer artikel di jurnal Q1 dan Q2. Dua buku yang ditulis oleh beliau adalah the potential health of polyphenols during the pandemic of COVID-19 and Insentif kader posyandu pada saat pandemi COVID-19.

Yulian Widya Saputra

Lahir di Magetan, Jawa Timur 30 Juli 1986. Saat ini penulis aktif mengajar di Jurusan Pendidikan MIPA FKIP Universitas Mulawarman, Program Studi Pendidikan Geografi sejak tahun 2012. Mata kuliah yang pernah diampu antara lain: Pengantar Filsafat Geografi, Geografi Desa Kota, Metodologi Penelitian, Geografi Sejarah, Meteorologi dan Klimatologi, Geografi Tumbuhan dan Hewan, Pengkajian Bahan Ajar, Perencanaan Pembelajaran dan Geografi Sejarah. Selain itu penulis pernah bekerja sebagai pengajar paruh waktu di MAN 1 Malang 2010-2012, Primagama Malang (2008-2012), dan GO Samarinda (2012-2019). Penulis juga aktif menjadi tutor UP-BJJ UT Samarinda (2013-sekarang). Penulis mengenyam pendidikan tinggi di Jurusan Geografi di Universitas Negeri Malang (UM Malang) strata satu tahun 2005-2010, selanjutnya strata dua 2010-2012 juga pada Universitas Negeri Malang. Pernah menjadi narasumber dan pemakalah di level lokal, nasional dan internasional bidang keilmuan geografi. Penulis juga aktif meneliti dan menerbitkannya di berbagai jurnal lokal dan nasional. Aktif di berbagai kegiatan profesi dan kemasyarakatan diantaranya anggota Ikatan Geografi Indonesia (2018-sekarang), Pengurus SSB SAMKOT SAMARINDA KOTA (2018-2022), Kelompok Kajian Iklim, Air, dan Bencana FMIPA Unmul (2014-sekarang), Anggota FORPIMGEO (2019-2021), Pembina OSN Bidang Studi

Geografi di Diknas Prov. Kaltim dan KSM Geografi MAN 2 Samarinda (2017-sekarang). Kepala Laboratorium Geografi FKIP UNMUL (2019-2023). Penulis dapat dikontak melalui yulian.widya@fkip.unmul.ac.id.

Muhammad Azmi.

Lahir di Banjarmasin, 8 Oktober 1990. Saat ini penulis aktif mengajar di Jurusan Pendidikan IPS Universitas Mulawarman, Program Studi Pendidikan Sejarah. Penulis mengampu beberapa mata kuliah bidang ilmu sejarah dan pendidikan sejarah, diantaranya Geografi Sejarah, Sejarah Kebudayaan, Sejarah Kota, Filsafat Pendidikan, Sejarah Afrika dan Media Pembelajaran Sejarah. Penulis mengenyam Pendidikan sarjana dan mendapatkan gelar Sarjana Pendididikan di Program Studi Pendidikan Sejarah FKIP Universitas Lambung Mangkurat dan memperoleh gelar Master Pendidikan di Magister Pendidikan Sejarah FKIP Universitas Sebelas Maret. Penulis saat ini aktif sebagai Editor in Chief Yupa: Historical Studies Journal dan menjabat pula sebagai editor di beberapa jurnal di luar kampus. Penulis aktif dalam ogranisasi profesi, seperti anggota Perhimpunan Prodi Pendidikan Sejarah Indoneia (P3SI) dan anggota Relawan Jurnal Indonesia (RJI). Email azmi@fkip.unmul.ac.id.